

Bertahan di Tengah Konflik:

Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)



Disusun:

Yaser Pratama Sandhy

173231035

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Yaser Pratama Sandhy

NIM : 173231035

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa

DI UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr:

Nama : Yaser Pratama Sandhy

NIM : 173231035

Judul : Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosah skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Surakarta, 30 November 2022

Pembimbing

Martina Safitry, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946** yang disusun oleh Yaser Pratama Sandhy telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta pada hari Rabu, 30 November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Dr. H. Moh. Mahbub, S. Ag., M.Si ()
NIP 19700410 199703 1 004

Penguji I Merangkap

Ketua Sidang : Aan Ratmanto, M.A. ()
NIP 19830625 201810 1010

Penguji II : Martina Safitry, S.S, M.A. ()
NIP 19860308 220181 2 001

Merangkap Sekretaris
(Pembimbing)

Surakarta, 30 November 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa

Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19710403 199803 1 005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakanku dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Adikku tersayang yang telah memberiku semangat
3. Saudara-saudaraku Trah Hadi Suropto yang telah memberi saran dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini
4. Teman-teman SPI B Angkatan 2017 yang telah memberi semangat dan motivasi

MOTTO

”Hanya Pendidikan yang bisa menyelamatkan
Masa depan, tanpa pendidikan Indonesia
Tak mungkin bertahan”.
(Najwa Shihab)

”Allahumma Yassir Wala Tu’assir”
(QS. Al-Baqarah: 286)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yaser Pratama Sandhy
Nim : 173231035
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946*" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Surakarta, 30 November 2022

Yang Menyatakan

Yaser Pratama Sandhy

NIM: 173231035

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan yang lurus dalam ajaran agama Islam yang sempurna.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang *Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M. Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Latif Kusairi, M.A., selaku Ketua Jurusan Peradaban Islam.
4. Moh. Ashif Fuadi, M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Peradaban Islam.
5. Martina Safitry, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar di bangku perkuliahan.

7. Para Staf di Perpustakaan Rekso Pustoko dan Jogja Library Center yang telah membantu menyediakan sumber data penelitian skripsi.
8. Segenap teman-teman SPI B angkatan 2017, yang telah kebersamai dan menemani penulis saling bertukar argumen dan gagasan selama studi.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat bermanfaat bagi kami.

Surakarta, 30 November 2022

Yaser Pratama Sandhy
NIM 173231035

ABSTRAK

Yaser Pratama Sandhy, 2022, **Bertahan di tengah konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran tahun 1945-1946**, Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penelitian ini merekonstruksi proses historis Sejarah Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran tahun 1945-1946. Sejarah Revolusi Di Praja Mangkunegaran sendiri merupakan pertemuan kebencian rakyat atas pemimpin-pemimpin tradisional dengan kepentingan kekuatan politik dan kepentingan nasional. Dalam hal ini yang dimaksud pemimpin tradisional adalah dua raja dari kerajaan di Surakarta yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Hal yang melatarbelakangi Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran adalah kebencian rakyat terhadap Mangkunegara VIII yang tidak mau melepaskan hak istimewa swapraja dan ingin tetap menjadi raja di Mangkunegaran yang menyebabkan pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan Barisan Banteng tahun 1946. Yang menjadi menarik untuk dikaji kemudian adalah Bagaimana Praja Mangkunegaran dapat bertahan ditengah arus revolusi sosial di Surakarta. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut dibuat pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi Surakarta pada masa revolusi kemerdekaan? 2. Bagaimana praja mangkunegaran menyikapi fenomena revolusi sosial di Surakarta pada tahun 1945? 3. Bagaimana proses Praja Mangkunegaran mengakui kedaulatan Republik Indonesia?.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan pendekatan politik dan sosial. Sumber yang digunakan berupa buku, arsip dan koran (Studi Pustaka). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peristiwa Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran terjadi pada tahun 1946. Peristiwa tersebut merupakan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan Barisan Banteng untuk menculik Mangkunegara VIII agar melepaskan hak swapraja.- Gerakan Barisan Banteng sendiri memberontak sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 18 April 1946 dan 28 Mei 1946. Namun pemberontakan tersebut tidak berhasil menculik Mangkunegara VIII karena banyaknya pasukan militer Mangkunegaran yang berjaga dan menggunakan senjata lengkap. Mangkunegara VIII sendiri ingin mempertahankan hak swapraja dan ia juga mengeluarkan maklumat yang berisi ingin mempertahankan hak swapraja dan sistem feodal. Namun pemerintah pusat RI memberi peringatan agar Mangkunegara VIII melepaskan hak swapraja tersebut dan mengakui kedaulatan NKRI. Dan pada akhirnya Mangkunegara VIII akhirnya pasrah dan rela melepas hak swapraja. Hal itu bermula dari keputusan surat presiden No. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli yang berisi ingin menghilangkan kekuasaan aristokrasi Jawa, menghapus status swapraja kraton dan menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah.

Kata Kunci: Revolusi Sosial, Praja Mangkunegaran, Kasunanan dan Mangkunegaran, Swapraja, Barisan Banteng, Surakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Kerangka Konsep	21
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II Sistem Swapraja Mangkunegaran Sebelum Revolusi	26
A. Pemerintah dan Politik Birokrasi Tradisional Mangkunegaran	26
B. Kondisi Ekonomi dan Sosial Praja Mangkunegaran Sebelum Kemerdekaan	38
BAB III Swapraja Mangkunegaran Sepanjang tahun 1945-1946	56
A. Barisan Banteng dan Respon Masyarakat Surakarta.....	56
B. Serangan Pertama dari gerakan Anti Swapraja.....	66
C. Serangan Kedua dari gerakan Anti Swapraja.....	70
D. Kondisi Sosial dan Ekonomi Mangkunegaran.....	71

E. Kondisi Politik di Mangkunegaran.....	80
F. Menjelang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta.....	84
BAB IV Pembentukan Kotamadya Surakarta dan Proses Pengakuan Mangkunegaran	86
A. Penghapusan Status Daerah Istimewa 15 Juli 1946	88
B. Respon Politik Mangkunegaran VIII setelah penghapusan DIS.....	91
C. Respon Sosial dan Ekonomi	93
D. Menyerahnya Mangkunegaran VIII dan Pengakuan Kedaulatan NKRI.....	99
BAB V Kesimpulan	101
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran-Lampiran Arsip.....	112

DAFTAR SINGKATAN

DIS	: Daerah Istimewa Surakarta
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Dr	: Dokter
Drs	: Doktorandus
GRI	: Gerakan Rakyat Indonesia
HIS	: Hollandsch Inlandsche School
Ir	: Insinyur
J.B	: James Baquel
Kg	: Kilogram
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
Mr	: Mister
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pakasa	: Pakempalan Kawula Surakarta
PB	: Paku Buwono
PDRT	: Pemerintahan Daerah Rakyat dan Tentara
Peta	: Pembela Tanah Air
RI	: Republik Indonesia
R.M	: Raden Mas
R.P	: Raden Panji
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

Akte Van Verband	: Surat Perjanjian
Alienasi	: Proses menuju keterasingan
Apanage/Lungguh	: Tanah pemberian dari Raja kepada putranya
Bau	: Tanah garapan
Bekel	: Pamong Desa setingkat dibawah lurah
Bovenlanden	: Tanah Hulu atau Tanah Pedalaman
Bumi pituwas	: Tanah pensiun
Carik	: Sekretaris Desa
Cendekiawan	: Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.
Clash	: Bentrokan
Contract	: Perjanjian
Cultuur Stelsel	: Sistem Tanam Paksa
De fakto	: Bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti wilayah, rakyat, dan pemerintahan

De jure	: Bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru
Demang	: Lurah
Desadiensten	: Sistem kerja paksa yang dilegalkan dalam membangun jembatan, infrastruktur desa, dan perbaikan jalan
Diadik	: Komunikasi yang terjadi antara dua orang
Domein Verklaring	: Pernyataan sebagai hak milik
Enklave	: Daerah Kantung
Establishment	: Unsur-unsur orde lama/golongan berkedudukan
Ex Digulis	: Mantan para tahanan yang diasingkan di Digul
Fuselir	: Letnan pangkat satu
Glebagan	: Sistem pola tanam yang menerapkan perguliran komoditas tanaman
Glidig	: Buruh yang Bekerja di pabrik gula atau kebun tebu
Gouverment Ordonantie	: Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama dengan Volksraad dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda
Gupermen	: Gubernur

Heiho	: Organisasi militer bentukan jepang
Herendiensten	: Sistem tradisional yang dilegalkan dalam membangun jalan dan memperbaiki desa
Hoofd Administratur	: Kepala Administrasi
Kabayanan	: Perangkat Desa
Kaigun	: Badan Angkatan Laut bentukan jepang
Kamantren	: Wilayah administrasi pemerintahan yang berada dibawah kecamatan dan diatas desa atau kelurahan yang berlaku pada masa Hindia Belanda.
Kamitua	: Kepala Dusun
Kasepen	: Buruh yang bekerja di sawah
Kawedanan	: Wilayah administrasi pemerintahan yang berada dibawah kabupaten dan diatas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda.
Kawula gusti	: Hubungan manusia dengan tuhan
Kenpei-Ho	: Polisi Militer Pribumi masa pendudukan jepang
Kenpeitai	: Satuan polisi militer jepang
Kuli kenceng	: Orang yang memiliki tanah pekarangan dan sawah
Landhuur	: Sistem sewa tanah yang berada di wilayah kerajaan

Modin	: Kyai kampung
Onderbouw	: Organisasi non-politik yang berada dibawah naungan partai politik tertentu
Onderneming	: Wilayah sekitar perusahaan perkebunan
Opper houtvester	: Pimpinan perusahaan
Opsir	: Pangkat kemiliteran tingkat perwira
Opzicter	: Pengawas
Panggede	: Golongan Penguasa
Petilasan	: Tempat Keramat
Pinesthi	: Sudah ditakdirkan
Privilege	: Hak istimewa
Priyayi	: Golongan Bangsawan
Rangga	: Gelar untuk pejabat
Rat Pradata	: Pembantu di dalam pengadilan
Residen	: Pemimpin Karesidenan
Rust in orde	: Kebijakan tata tertib yang digunakan pada zaman kolonial Belanda
Sentana dalem	: Keluarga Raja
Studiefonds	: Beasiswa
Swapraja	: Tanah-Tanah Kerajaan

Tinitah	: Dijadikan rakyat
Trah	: Keturunan
Ulu-ulu	: Pejabat pamong desa yang pekerjaannya khusus mengurus pengairan khususnya sawah
Volksgemeenschappen	: Suatu Daerah Otonom yang dibiarkan mengatur dan menjalankan secara mandiri
Vorstenlanden	: Wilayah-Wilayah Kerajaan
Wadana	: Pembantu
Wong cilik	: Rakyat
Zelbesturende landschappen	: Suatu pemerintahan pribumi yang memperoleh otonominya karena sejumlah perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Zelfbestuur	: Pemerintahan Sendiri

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	: Tabel Harga Kebutuhan Pokok di Wilayah Pasar Mangkunegaran.....	74
TABEL 3.2	: Tabel jumlah pinjaman uang di bank-bank di sekitar Surakarta tahun 1946.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan kata-kata magis yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kata-kata proklamasi yang dibacakan Soekarno mengandung dua maksud, yaitu pemindahan kekuasaan dan pembentukan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Walaupun diharapkan dengan cara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, proses pemindahan kekuasaan berjalan penuh dengan pergolakan dan dalam waktu yang relatif lama. Beberapa peristiwa seperti pertempuran Kota Baru di Yogyakarta, penyerbuan *Kenpeitai* di Surakarta maupun peristiwa-peristiwa lain di beberapa kota memperlihatkan proses pemindahan kekuasaan dengan darah.¹

Proses pemindahan kekuasaan di Surakarta berjalan penuh dengan heroisme dan pergolakan-pergolakan kekuasaan. Bagi para pejuang, proses pemindahan kekuasaan di Surakarta harus dijalankan dengan melucuti senjata Jepang dan penguasaan atas sarana dan prasarana yang diduduki oleh serdadu Jepang. Para pejuang yang menggerakkan aksi-aksi revolusioner terdiri dari beberapa kelompok, seperti *ex Digulis*, bekas Heiho, anggota Peta dari kesatuan Wonogiri dan Manahan, *Kaigun*, *Heiho*, *Kenpei-Ho*, dan beberapa kesatuan yang baru pulang tugas dari luar

¹ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka. Hal 92

Surakarta. Aksi-aksi para pejuang berjalan tanpa komando mengibarkan bendera merah putih di berbagai instansi sejak tanggal 19 Agustus 1945.²

Pelaksanaan Pemerintahan di Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran) seperti biasanya dilaksanakan oleh dua pepatih, bukan langsung oleh Paku Buwono XII dan Mangkunegaran VIII dan tidak pernah diusahakan menjadi dan tidak pernah diusahakan menjadi satu seperti di Yogyakarta yang ternyata siap menjelang kemerdekaan dengan persatuan pemerintahan Kasultanan dan Pakualaman. Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII langsung memegang pemerintahan. Tidak adanya persatuan Paku Buwono XII dan Mangkunegara VIII itulah yang menghambat jalannya pemerintahan di Surakarta. Rakyat tidak merasakan kehadiran pemerintahan dua swapraja itu. Tidak pula mendapat petunjuk atau isyarat apa pun dari dua orang raja itu untuk melaksanakan revolusi 17 Agustus 1945 yang mau tidak mau harus menghadapi tentara Jepang bersenjata. Meskipun demikian dengan semangat yang tinggi rakyat dan kaum muda revolusioner bertindak tanpa pimpinan Paku Buwono XII dan Mangkunegara VIII, dengan menempuh resiko berat.³

Revolusi sosial merupakan gelombang pasang gerakan rakyat dari bawah yang tidak bisa dielakkan selama berlangsungnya revolusi Indonesia. *Clash* antara organisasi revolusioner dan unsur-unsur orde lama atau golongan berkedudukan (*establishment*) tidak dapat dihindarkan. Organisasi-organisasi revolusioner yang mencakup struktur-struktur politik baru, pada satu pihak menghancurkan kekuasaan

² *Ibid* hal 93

³ H. Karkono Kamajaya. 1993. *Revolusi Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 3-4

kolonial yang dominan dan mendobrak struktur tradisional pada pihak lain. Perubahan struktur yang radikal tidak hanya menimbulkan partisipasi mobilisasi politik tetapi juga konflik dan kekerasan yang merupakan ciri revolusi sosial. Revolusi sosial yang terjadi di Surakarta mempunyai ciri yang berbeda dengan revolusi sosial yang terjadi di daerah-daerah lain. Apabila revolusi sosial di Pekalongan, Aceh, dan Sumatera Utara yang menempuh jalannya sendiri, maka revolusi sosial di Surakarta berada dalam krisis ekonomi dan sosial. Revolusi sosial di Surakarta merupakan pertemuan antara kebencian rakyat atas pemimpin-pemimpin tradisional dengan kepentingan kekuatan politik dan kepentingan nasional. Kekuatan politik dan kekuatan bersenjata berhasil "menciptakan" dan melakukan gerakan anti swapraja. Dalam hal ini, Surakarta menyimpan banyak "bahan bakar" yang mudah terbakar api. "Bahan bakar" yang dimaksud adalah dominasi kraton atas rakyatnya, penderitaan rakyat atas kekuasaan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, persaingan antara dua kraton, dan ketidakpedulian kraton terhadap revolusi. Oleh karena itu, "api" yang merupakan kepentingan kekuatan-kekuatan politik atau kekuatan bersenjata dapat dengan membakar Surakarta.⁴

Secara umum, kondisi sosial ekonomi masyarakat Surakarta selama masa revolusi berada dalam keadaan yang menyedihkan. Pada masa awal revolusi, praktek-praktek eksploitasi ekonomi yang telah berlangsung selama masa pendudukan Jepang masih terus berjalan. Selain itu, badan-badan ekonomi bentukan Jepang yang dikelola kraton masih tetap bekerja dan mengorganisasikan penyerahan

⁴ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan*. Hal 152-153

sumber-sumber ekonomi ke kraton. Aktivitas kraton menjadi kurang seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli 1946 yang berisi pembekuan status swapraja kraton dan menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah. Walaupun telah dibekukan ada beberapa kegiatan ekonomi yang masih dikelola oleh kraton, seperti pembagian dan pengumpulan pakaian, penarikan pajak, penetapan harga kebutuhan pokok, dan di beberapa daerah masih terjadi penyerahan padi.

Pada masa awal revolusi proses penyerahan padi ke kraton berjalan lebih eksploitatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apabila masa pendudukan Jepang, padi yang harus diserahkan hanya berkisar antara 30 hingga 50 ribu ton, maka pada pertengahan tahun 1945 sampai tahun 1946 ditentukan 64 ribu ton. Kuota penyerahan padi sebanyak itu didapatkan dari wilayah Kasunanan sebanyak 41.300 ton, Mangkunegaran sebanyak 16.400 ton dan daerah sekitar *onderneming* sebesar 6.300 ton. Walaupun, panen padi pada tahun 1946 mengalami keberhasilan yang diperkirakan mencapai 2,5 ton, tetapi kewajiban penyerahan padi tersebut tetap saja memberatkan petani.⁵

Kondisi yang memprihatinkan tersebut tidak saja diderita oleh para petani tetapi dialami pula oleh hampir sebagian besar masyarakat Surakarta maupun penduduk daerah republik. Kondisi yang tidak menentu selama berlangsungnya revolusi sangat berpengaruh pada tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Sebenarnya pemerintah lewat Kementerian Kemakmuran yang didasarkan pada harga-harga yang

⁵ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan*. Hal 110

berlaku pada masa pendudukan Jepang. Akan tetapi, beberapa harga kebutuhan pokok di pasar-pasar seluruh wilayah republik lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga tersebut semakin lama semakin tinggi seiring dengan semakin sulitnya posisi republik terhadap dominasi pasukan Belanda.⁶

Dalam KBBI Kata *swapraja* sendiri memiliki arti yaitu Tanah-tanah kerajaan. Dan dalam bahasa Belanda *swapraja* sendiri berasal dari kata *Vorstenlanden* yang artinya Tanah kerajaan. Dengan kata itu yang dimaksud dahulu pada zaman kolonial adalah kerajaan-kerajaan (*swapraja*) yang terdapat di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Untuk keperluan studinya Rouffer telah bertempat tinggal selama dua tahun (1887-1889). Walaupun *Vorstenlanden* itu timbul pada tanggal 13 Februari 1755 dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, yang membagi dua kerajaan Mataram dalam kerajaan Susuhan di Surakarta dan kerajaan Kasultanan di Yogyakarta, tetapi kata "*Vorstenlanden*" itu baru benar-benar dipergunakan secara resmi sesudah tahun 1800. Sebelumnya orang Belanda menggunakan kata "*Bovenlanden*" yang dapat diterjemahkan dengan "tanah hulu atau "tanah pedalaman. Di tanah-tanah kerajaan itu para Raja memiliki otonomi (yang disebut "*zelfbestuur*", berasal dari kata *zelf* = sendiri, dan *bestuur* = pemerintahan) di luar daerah *Vorstenlanden* itu rakyat langsung diperintah oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Hal-hal yang masuk dalam otonomi para Raja itu dicantumkan dalam perjanjian atau "*contract*". Apabila para Raja melanggar *contract* itu, barulah Belanda mengambil tindakan. Dengan "*Akte van Verband*" pemerintah Hindia

⁶ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan*. Hal 111

Belanda mengatur pergantian raja. Dengan kata lain, Raja baru harus menandatangani Akte tersebut sebelum dinobatkan.⁷

Latar Belakang Sejarah Swapraja sendiri berawal dari awal abad XX Surakarta dan Yogyakarta menduduki suatu wilayah di Jawa Tengah yang disebut dengan Vorstenlanden, secara harfiah berarti "Tanah Raja-Raja", tetapi lebih pantas diterjemahkan sebagai "Daerah Kerajaan Jawa". Vorstenlanden merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua karesidenan. Tetapi wilayah ini mempunyai status yang khusus, walaupun agak mendua, sebab dua karesidenan ini terdiri dari dua kerajaan swapraja yang nominal. Kerajaan yang semi otonom ini adalah suatu hasil sampingan yang aneh dari hubungan Belanda-Jawa. Sisa-sisa suatu proses pengausan dari imperium Mataram yang pernah berkuasa yang dahulu meliputi sebagian besar pulau Jawa pada abad XVII dan awal abad XVIII. Karesidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu Kerajaan atau Kasunanan Surakarta, milik Susuhunan dan Mangkunegaran. Kedua penguasa ini mempunyai istana di ibukota Surakarta, kira-kira 4/5 masuk wilayah Susuhunan dan sisanya milik Mangkunegaran. Kontras dengan wilayah Karesidenan Yogyakarta yang sebagian besar adalah milik Kasultanan Yogyakarta, sedangkan hanya sebuah wilayah kecil di sudut barat daya

⁷ G.P. Rouffear. 1983. *Swapraja diterjemahkan oleh M. H. Pringgokusumo*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 2

dan sebuah *enklave* (daerah kantong) kecil sekitar istana merupakan kepunyaan Pangeran Pakualam dikenal sebagai Pakualaman.⁸

Salah satu ciri yang lebih menarik dalam sejarah Indonesia modern adalah kontras besar antara nasib dua wilayah keraton yang bersaing yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pada hari-hari awal Revolusi empat penguasa tradisional semuanya diberi piagam oleh Presiden Soekarno yang mengukuhkan mereka dalam kedudukannya masing-masing, dengan pengertian bahwa mereka akan mendukung Republik yang baru lahir itu. Akan tetapi hanya Yogyakarta yang berhasil mempertahankan otonominya selama Revolusi, dan sesudah perang kemerdekaan dimenangkan muncul sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1950. Kemudian Yogyakarta menjadi perintis dalam perubahan di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono IX yang mempertahankan penguasannya atas pemerintahan setempat Sultan, yang menggantikan ayahnya pada tahun 1940. Dibawah pimpinannya Daerah Istimewa Yogyakarta ditransformasikan dari sebuah bentuk pemerintahan yang paling tradisional di Indonesia menjadi suatu pemerintahan yang paling tradisional di Indonesia menjadi suatu pemerintahan yang lebih dekat dengan pola Barat yang demokratis daripada daerah mana pun. Yogyakarta sesungguhnya menjadi model pemerintahan nasional untuk pembaharuan administratif, politik dan perubahan revolusioner pada umumnya. Namun harus ditengahkan disini bahwa sebelum Hamengku Buwono IX menjadi Sultan, sistem administrasi dan ekonomi

⁸ George. D. Larson. 1990. *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Di Surakarta*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 1

tradisional telah diubah Belanda dengan mengadakan pembaharuan selama tiga dasawarsa.⁹

Kisah perkembangan Revolusi Surakarta sangat berlainan dengan Yogyakarta. Disini sebagai raja, Susuhunan dan Mangkunegara, tidak bersimpati dengan Revolusi. Sebagai Raja mereka mereka tidak mengambil tindakan yang progresif dan akhirnya mereka kehilangan kesetiaan rakyatnya. Pada awal Revolusi, meskipun bertentangan dengan kehendak semula dari pemerintah setempat yang mau membentuk sebuah Daerah Istimewa, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran dilucuti dari otonomi pemerintahannya. Masa Revolusi di Surakarta merupakan masa pergolakan sebab kota ini menjadi pusat kegiatan komunis, perang antar kelas, penculikan, dan kekacauan umum yang merembes ke bagian-bagian lain di Jawa, dan mempengaruhi jalannya Revolusi Indonesia.¹⁰

Kalau masalah kepemimpinan, penguasa-penguasa tradisional di Surakarta hanya menguasai suatu wilayah yang hampir tidak melebihi istana mereka. Susuhunan Pakubuwono XII adalah tokoh yang didiskreditkan, hidup dalam kemapanan, dan lebih banyak berada di ibukota Republik Indonesia daripada di Surakarta. Kemerosotan statusnya dan status keluarganya tercermin pada kondisi bangunan-bangunan yang berada di kompleks istana, kebanyakan diantaranya memerlukan reparasi. Penguasa tradisional lainnya, Mangkunegara VIII, juga dilucuti sebagian besar kekuasaannya, tetapi telah menunjukkan kegesitan daripada

⁹ *Ibid* hal 2-3

¹⁰ George D. Larson. *Op. Cit* hal 3

Susuhunan, dan bisa memelihara istananya yang indah serta dengan giat mempromosikan kebudayaan keraton dan pariwisata. Mangkunegara VIII sendiri merupakan tokoh yang berkharismatik, memiliki kewibawaan yang tinggi dan sangat bijaksana dalam menjalankan pemerintahan di istana Mangkunegaran. Walaupun Mangkunegara VIII sendiri masih muda dan belum berpengalaman, namun kenyataannya beliau masih tetap kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Dan kedua istana ini menerima subsidi dari pemerintah nasional untuk membantu memelihara keratonnya. Jadi kedua istana ini yang pernah memainkan peran vital dalam masyarakat Surakarta, telah menurun dan nyaris menjadi tak lebih dari sebuah museum.¹¹

Benih revolusi sosial di Surakarta dilatarbelakangi kondisi sosial dan ekonomi. Salah satu yang menjadi triger/penentu adalah kemerosotan di dalam istana. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena gerakan revolusi sosial bisa terlaksana karena kemerosotan di dalam istana. Karena di daerah Yogyakarta yang mempunyai kondisi sosial dan ekonomi yang tidak begitu berbeda, akan tetapi bisa bertahan di revolusi fisik. Di Yogyakarta wilayah perkebunan milik asing agak sedikit dan memiliki pola lain dalam keterlibatan ekonomi oleh pihak keraton. Sedangkan kedua keraton di Surakarta terlibat langsung perkebunan dalam skala besar di tanah yang diusahakan keraton secara komersial. Berbeda dengan tanah keraton di Yogyakarta yang merupakan perusahaan yang relatif sederhana yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok dari keraton. Namun baik di Yogyakarta maupun

¹¹ *Ibid* hal 4-5

di Surakarta secara meluas terlibat dalam penyewaan tanahnya kepada perusahaan Barat yang membawa dampak besar di kedua wilayah ini.¹²

Yang menarik dari penelitian ini adalah tentang penculikan Susuhunan Pakubuwono XII dan Kedaulatan Mangkunegara VIII dalam mempertahankan swapraja. Penculikan Susuhunan Pakubuwono XII terjadi pada tanggal 24 April 1946 oleh kesatuan Barisan Banteng. Kesatuan Barisan Banteng menerobos keraton dan berhasil menculik Susuhunan Pakubuwono. Dan aksi penculikan tersebut berlanjut dengan menculik keluarga istana Kasunanan dan seorang Patih dari istana Kasunanan. Aksi penculikan tersebut berlanjut dan sasaran mereka kali ini adalah Mangkunegara VIII. Namun penculikan tersebut gagal karena di gerbang masuk istana Mangkunegaran dijaga ketat oleh pasukan penjaga yang bernama Rumeksopuro. Setelah Susuhunan berhasil diculik, Kesatuan Barisan Banteng menyuruh Susuhunan untuk menyerah dan rela agar melepaskan seluruh hak swapraja. Dan pada tanggal 30 April 1946, Susuhunan Pakubuwono mengeluarkan pengumuman yang berisi kerelaan akan hilangnya swapraja di Surakarta dan menyerahkan semua urusan ini kepada pemerintah pusat. Kesediaan Susuhunan ini tidak diikuti oleh Mangkunegara VIII, yang justru mempunyai sikap yang berlawanan dengan kehendak kekuatan-kekuatan antiswapraja. Sikap Mangkunegara tersebut menimbulkan reaksi keras dari pihak-pihak yang berposisi dengan keraton. Namun Mangkunegara VIII tetap pada pendirian dan kewibawaanya. Walaupun masih muda dan belum berpengalaman, Mangkunegara

¹² George D. Larson. *Op. Cit hal 5*

VIII berhasil mempertahankan kedaulatan istana di tengah konflik. Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Bertahan di tengah konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946.**

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Suasana revolusi sosial di Surakarta sangat mencekam, hal tersebut karena adanya pemberontakan yang dilakukan kesatuan Barisan Banteng yang tidak setuju dengan adanya pemerintahan swapraja. Dan kemudian kesatuan Barisan Banteng melakukan penculikan terhadap dua raja keraton di Surakarta yaitu Susuhunan Pakubuwono XII dan Mangkunegaran VIII. Dan kesatuan Barisan Banteng berhasil menangkap Susuhunan Pakubuwono XII, akan tetapi mereka tidak berhasil menangkap Mangkunegaran VIII. Mangkunegaran berhasil lolos dari upaya penculikan yang dilakukan kesatuan Barisan Banteng. Dan pada akhirnya raja Kasunanan yaitu Susuhunan Pakubuwono XII menyerah dan menyerahkan semua urusan kepada pemerintah pusat. Dan pada saat itu juga Mangkunegaran VIII berhasil mempertahankan kedaulatan istananya di tengah konflik.

Berdasarkan Batasan dan Rumusan masalah diatas, maka disampaikan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi Surakarta pada masa revolusi kemerdekaan?
2. Bagaimana praja mangkunegaran menyikapi fenomena revolusi sosial di Surakarta tahun 1945?

3. Bagaimana proses Praja Mangkunegaran mengakui kedaulatan Republik Indonesia?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup juga dibutuhkan dalam penelitian agar seorang peneliti tidak terlalu jauh melebar ke topik yang berbeda dari yang diteliti. Pada penelitian ini lebih fokus kepada Sejarah Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran 1945-1946. Masalah ini timbul disebabkan Runtuhnya sistem Swapraja yang berada di Kasunanan dan Mangkunegaran. Dan faktor lainnya juga disebabkan ketika dua tokoh pemimpin keraton, baik Susuhan maupun Mangkunegaran berbeda pendapat dalam hal kerelaan hilangnya Swapraja. PB XII sendiri mengeluarkan pengumuman bahwa dia bersedia dan rela akan hilangnya swapraja di Surakarta dan menyerahkan semua urusan kepada pemerintah pusat.

Kesediaan Susuhunan ini tidak diikuti oleh Mangkunegara VIII, yang justru mempunyai sikap berlawanan dengan kehendak kekuatan-kekuatan yang anti swapraja. Pada tanggal 4 Mei 1946, KNI Daerah Kabupaaten Kota Mangkunegaran mengeluarkan mosi yang mendesak agar pemerintah Mangkunegaran melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Hal ini juga menjadi pemicu aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat Surakarta seperti aksi penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Barisan Banteng yang diketuai oleh Dr. Moewardi. Mereka menculik mulai dari Papatih Dalem hingga Keluarga-keluarga kerajaan kraton, hal ini mengingat lemahnya dukungan terhadap kraton dan munculnya mosi

yang didukung oleh sebagian besar kekuatan yang berpengaruh di Surakarta dan menjadikan Susuhunan PB XII menyerah.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian dan penulisan ini yang *pertama*, mampu mengetahui bagaimana kondisi Surakarta pada masa revolusi kemerdekaan. Kondisi Surakarta sendiri pada masa revolusi kemerdekaan sangat memprihatinkan, pada bidang ekonomi dan sosial sendiri sangat menyedihkan. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan pokok di pasar naik dan juga rakyat sendiri juga membutuhkan bahan pokok tersebut agar memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan rakyat harus meminjam uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun melunasi hutangnya. Dalam kondisi sosialnya sendiri masyarakat sekitar mengalami kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran. Dalam bidang politik sendiri terjadi ketidakseimbangan, hal ini dikarenakan ambisi dari Mangkunegara VIII menjadi kepala daerah tunggal di Daerah Istimewa Surakarta dan juga Mangkunegara VIII tidak mau menjadi bawahan dari Susuhunan. Hal itu juga Mangkunegara VIII juga tidak mau melepas hak swapraja, dan juga hal itu menyebabkan pemberontakan yang dilakukan oleh Barisan Banteng pimpinan Dr. Moewardi dan pasukan oposisi. Dan pemberontakan tersebut selama 2 kali yaitu pada tanggal 18 April 1946 dan 28 Mei 1946. Pemberontakan tersebut bertujuan ingin menangkap Mangkunegara VIII dan juga Mangkunegara VIII segera melepas hak istimewa swapraja. yang *kedua*, mampu mengetahui bagaimana praja mangkunegaran menyikapi fenomena revolusi sosial di Surakarta pada tahun 1945.

Praja mangkunegaran sendiri menyikapi hal tersebut dengan tenang dan positif, walaupun awal-awalnya mereka was-was dan bingung, terutama raja Mangkunegaran VIII. Walaupun sang raja Mangkunegaran VIII berusia muda, namun sang raja tersebut berusaha untuk bersikap tenang dan positif walaupun keadaan di luar dan didalam istana sangat kacau. Yang *ketiga*, mampu mengetahui bagaimana proses praja mangkunegaran mengakui kedaulatan Republik Indonesia. proses untuk mengakui kedaulatan RI juga menemui kesulitan karena Mangkunegara VIII bersifat keras kepala, tetap berprinsip pada pendiriannya dan juga tidak mau melepaskan hak istimewanya. Namun pemerintah RI juga tidak kehilangan akal, bahkan pemerintah RI ingin membekukan daerah istimewa dan juga daerah wilayah kekuasaan Mangkunegaran, agar Mangkunegara VIII melepaskan hak istimewanya dan juga mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Peringatan tersebut membuat Mangkunegara VIII pasrah dan tunduk pada pemerintah Republik Indonesia. Dan hal itu juga membuat Mangkunegara VIII melepaskan hak istimewa atau swapraja.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai informasi mengenai luas wilayah daerah kekuasaan istana Mangkunegaran. Luas wilayah daerah kekuasaan Mangkunegaran meliputi daerah Wonogiri dan Karanganyar. Walaupun luas wilayahnya meliputi dua daerah tersebut, namun kedua daerah tersebut memiliki tanah yang subur dan cocok ditanami berbagai tumbuhan di berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan.

Dan sektor inilah yang menjadi pemasukan keuangan istana Mangkunegaran. Di sektor lainnya yang tak kalah kontribusinya adalah sektor militer, militer di istana Mangkunegaran merupakan militer yang terkuat, hal ini didukung oleh peralatan militer seperti senapan dan meriam. Hal ini juga didukung dengan prajurit yang tangguh, kuat dan gagah berani. Hal inilah yang menyebabkan militer di Mangkunegaran sangat ditakuti oleh musuh.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah penelitian tidak terlepas dari namanya tinjauan pustaka yang digunakan untuk sebagai acuan untuk meneliti sesuatu agar tulisannya tersusun dengan baik dan sistematis sehingga mudah untuk membacanya. Kerangka penulisan sendiri merupakan suatu bagan yang kumpulan sumber-sumber penulisan dapat dipilah oleh sang penulis demi menyelesaikan penelitian sejarah.

Buku *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan* karya Julianto Ibrahim yang berisi tentang Kriminalitas dan kekerasan yang terjadi di Surakarta pada masa revolusi. Penulis juga mencoba menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan dan kriminalitas yang muncul bebarengan dengan semangat revolusi fisik. Di dalam perjuangan mencari jati diri negara tersebut, ternyata banyak diantara elemen pejuang yang masing-masing memiliki kepentingan dan berlindung dibawah gelora semangat revolusi. Kemelut revolusi di Surakarta berawal pada waktu dipindahkannya ibukota RI ke Yogyakarta, banyak partai politik, *onderbouw* dan kekuatan-kekuatan oposisi pindah dari Jakarta dan berkantor di Surakarta. Para oposan memiliki

kepentingan untuk memiliki kepentingan untuk bersaing dengan lawan politiknya yang bermarkas di Yogyakarta.

Surakarta, kota yang memiliki kondisi geografis strategis di persimpangan keempat penjuru angin dan kemudahan merekrut massa dari berbagai aliran politik, maka kota ini terpilih sebagai kota penyangga ibukota RI. Selain itu, aura revolusi yang berusaha menghancurkan sisa feodalisme yang masih bercokol di Surakarta yang direfleksikan pada para penguasa kraton dan istana, pamongpraja dan anthe-anthe kolonial. Turbulensi menghasilkan perampokan, kekerasan dan pembunuhan, dan bentuk-bentuk kekerasan lain. Pihak kraton, pamongpraja dan beberapa tuan tanah menjadi sasaran aksi-aksi perbanditan. Tentu disini terkait dendam sejarah yang dapat berupa dendam ekonomis, politis dan kultural. Gerakan sosial pada masa revolusi tersebut merupakan pertemuan ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin tradisional dengan kepentingan politik dari para oposan yang ingin menggoyang pemimpin-pemimpin nasional.

Buku *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912-1942* karya George D. Larson yang berisi tentang pandangan luas dan pengetahuan mendalam tentang proses politik, kultur dan sosial, dengan sumber-sumbernya. Buku ini juga memusatkan perhatian kepada dua masalah yang saling berkaitan. Di satu pihak karya ini merupakan suatu studi sejarah politik lokal tentang suatu tempat dan periode yang diabaikan kota Surakarta selama beberapa dasawarsa terakhir. Kerusuhan dan pembunuhan yang terjadi di Surakarta tidak dilepaskan oleh suatu masa yang sangat menentukan daerah ini, yaitu revolusi

kemerdekaan Indonesia. Pada awal revolusi, meskipun bertentangan dengan kehendak semula dari pemerintah pusat yang mau membentuk sebuah daerah istimewa, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran dilucuti dari otonomi pemerintahannya dan sesudah kemerdekaan dicapai masuk menjadi bagian dari Jawa Tengah. Kehidupan Politik kraton menjelang revolusi ditandai oleh dua hal, yaitu persaingan antara Kasunanan dengan Mangkunegaran dan suksesi di Mangkunegaran. Alasan yang menjadi dasar persaingan ini adalah ketidaksudian kraton Kasunanan menerima kemandirian Mangkunegaran yang dianggapnya sebagai bagian dari wilayahnya.

Buku *Daerah Istimewa Surakarta* karya Imam Samroni yang berisi tentang Keberadaan Daerah Istimewa dapat ditinjau dari perspektif, historis, filosofis dan yuridis. Surakarta merupakan daerah istimewa yang terbukti asal-usulnya dan keberadaannya, yaitu daerah swapraja yang merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram. Kedudukan daerah swapraja serta landasan yuridisnya dalam konteks sistem pemerintahan memang berbeda dengan daerah otonom biasa. Daerah swapraja mempunyai hak dan kewenangan lebih khusus, terkait dengan kontribusi dan partisipasi. Dalam bidang politik, karena swapraja memiliki pemerintahan yang asli yang berdasar yuridis, maka swapraja diberi status istimewa yaitu *zelfbesturend-landschap*. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, hak konstitusional daerah swapraja ini sebenarnya dijamin dalam pasal 18 UUD 1945. Dalam konstitusi itu jelas diakui adanya daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam bagian penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang dimaksudkan daerah-

daerah yang bersifat istimewa itu meliputi *Zelbesturende landschappen* maupun *volksgemeenschappen*.

Buku *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* karya Benedict Anderson berisi tentang analisisnya yang intensif dan rinci tentang asal mula revolusi Indonesia mengungkap ciri-ciri penting yang tidak begitu tampak dalam uraian mengenai revolusi-revolusi modern lainnya. Ia memperlihatkan betapa pola sosial-politik revolusi modern lainnya, dan bahwa pecahnya revolusi Indonesia tidak dapat diterangkan secara memuaskan melalui analisis Marxis konvensional, maupun dipandang dari segi "alienasi kaum cendekiawan" atau "rasa frustrasi karena harapan-harapan yang kian memuncak". Ia menjelaskan bahwa pusat daya dorong kekuatan revolusi pada tahap pertama perjuangan merebut kemerdekaan itu terutama dan bahkan pada taraf yang menentukan, terletak di tangan pemuda Indonesia. Buku ini juga memberikan keterangan yang jauh lebih luas daripada buku-buku sebelumnya tentang asal mula partai-partai politik, militer, dan organisasi-organisasi pemuda serta menjelaskan hubungan antara kesemuanya itu dengan masalah pembangunan kekuatan politik nasional sambil tetap menganut kebijakan revolusioner. Uraian tentang pertumbuhan tentara Indonesia dan peran penting yang dimainkannya semasa revolusi memberikan sumbangan besar untuk memahami kedudukan tentara sekarang dalam masyarakat Indonesia dan persepsi mengenai peran politiknya. Kelemahan dari buku ini adalah tidak membahas secara luas tentang revolusi sosial di Praja Mangkunegaran 1945-1946 dan di buku ini juga

tidak terdapat menjelaskan secara detail tentang Sejarah Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran.

G. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tidak lepas dari kerangka atau metode penelitian yang harus dilalui tahapannya oleh seorang peneliti pada umumnya. Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah ia menjelaskan ada 5 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (penulisan). Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode historis. Dan disini juga penulis menggunakan metode pendekatan politik dan sosial.

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik adalah awal yang harus dilakukan oleh peneliti. Dalam pemilihan topik dapat dilakukan dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, dimana secara emosional si penulis merupakan penduduk asli dari wilayah yang akan diteliti, sedangkan secara intelektual memiliki kesamaan dalam pemahaman.¹³ Kali ini penulis menggunakan kedekatan emosional dan menggunakan metode historis. Hal tersebut dikarenakan penulis ingin lebih mengetahui tentang Sejarah Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran 1945-1946.

2. Heuristik

¹³ Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 70-73

Heuristik atau pengumpulan sumber adalah tahap mencari bahan tulisan atau sumber-sumber sejarah baik berupa dokumen tertulis artefak atau sumber lisan.¹⁴

Dalam tahap kedua ini penulis mencari dan menggunakan sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis yang dimaksud oleh penulis yakni menggunakan berupa buku koran, dan arsip. Buku tersebut mengenai Sejarah Revolusi di Praja Mangkunegaran dan Daerah Istimewa Surakarta, Koran tersebut didapat dari Perpustakaan Jogja Library dan Arsip didapat dari Perpustakaan Rekso Pustoko.

3. Verifikasi

Tahap ketiga adalah verifikasi. Verifikasi adalah melakukan kritik terhadap sumber yang sudah ada didapatkan oleh peneliti. Menurut Kuntowijoyo verifikasi ada dua jenis, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kegiatan mengkritik suatu sumber berdasarkan isi atau makna atau maksud dari sumber tersebut. Sedangkan kritik ekstern adalah kegiatan mengkritik arsip atau sumber berdasarkan fisik atau wujud sampulannya, misalnya mengkritik sumber daari jenis kertas suatu arsip tersebut masuk jenis arsip tahun berapa maupun dari tinta.¹⁵ Dalam tahap verifikasi ini penulis melakukan kritik eksternal dalam konteks fisik seperti buku, arsip atau koran yang mengetahui Sejarah Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran 1945-1946. Sedangkan kritik intern, penulis melakukan kritik dengan memahami isi dan sumber yang ada.

¹⁴ Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 73-74.

¹⁵ Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 77.

4. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah tahap keempat. Dalam bukunya Kuntowijoyo *Metodologi Sejarah*, dikerucutkan bahwa interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu sumber untuk mengetahui kebenarannya., sedangkan sintesis adalah menyatukan apa yang telah diselidiki oleh seorang peneliti.¹⁶

Dalam penelitian dan penulisan kali ini, penulis sedikit kesulitan dalam proses analisis, karena analisis merupakan tahapan yang paling sulit dalam tahapan penelitian sejarah.

5. Historiografi

Historiografi (penulisan) merupakan tahapan akhir dan paling penting dalam sebuah penelitian yang harus ditulis secara sistematis. Dalam penyampaian tulisan menurut Kuntowijoyo terdiri dari tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian, dan hasil simpulan serta peneliti dituntut untuk bisa pandai beretorika agar bisa merangkai pembabagan metode demi metode secara utuh dalam sebuah karya tulis.¹⁷

H. KERANGKA KONSEP

Kerangka konseptual sangat diperlukan untuk menulis sebuah penelitian, tujuannya agar alur dalam penulisan tersebut agar mudah dipahami dan dimengerti

¹⁶ Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 78.

¹⁷ Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 80.

oleh pembacanya. Sejarah merupakan cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan di masa lampau.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang Sejarah Revolusi Sosial di Praja Mangkunegaran yang meliputi latar belakang terbentuknya sistem Swapraja, Runtuhnya Sistem Swapraja, Kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masa revolusi di Surakarta, Terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta.

Proses revolusi mencakup struktur-struktur politik baru, pada satu pihak menghancurkan kekuasaan kolonial yang dominan dan mendobrak struktur tradisional pada pihak lain. Perubahan struktural yang radikal pada pihak lain. Perubahan struktural tidak hanya menimbulkan partisipasi dan mobilisasi politik tetapi juga konflik, kekerasan, bahkan di beberapa daerah revolusi sosial. Revolusi sosial merupakan *clash* antara organisasi revolusioner dan unsur-unsur orde lama atau golongan yang berkedudukan (*establishment*).

Menurut Antony Reid, revolusi sosial adalah gerakan dari bawah, mengambil tindakan yang serupa di beberapa daerah yang berbeda-beda, akan tetapi tanpa koordinasi apa pun antara daerah yang berbeda-beda ini. Menurut Sartono Kartodirdjo berlangsungnya revolusi di beberapa daerah "berjalan" dalam empat skenario, yaitu (1) kristalisasi kekuatan sosial dalam badan perjuangan, (2) penggolongan kekuatan sosial itu berdasarkan ideologi yang terdiri dari kanan, tengah, dan kiri (3) polarisasi yang terjadi antara golongan itu (4) dominasi golongan radikal dalam episode awal revolusi fisik.

¹⁸ (Kuntowijoyo (1995-18))

Konsep revolusi sosial sendiri adalah yang paling sentral di dalam seluruh analisa sejarah perbandingan. Pengertian apa pun yang diberikan oleh kaum politisi dan para sejarawan harus mempertahankannya sebagai suatu alat analisa yang obyektif, yang sangat tidak tergantung pada apa pun yang disetujui atau tidak disetujui tentangnya.

Menurut Simon Fisher teori konflik ada dua macam yaitu teori kebutuhan dan teori identitas. Menurut teori kebutuhan sendiri disebabkan oleh benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar baik itu fisik maupun sosial yang belum terpenuhi. Sedangkan teori identitas sendiri adalah disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kelompok lain atau pemerintah, atas perlakuan tidak adil di masa lalu.

Pada dasarnya konsep Daerah Istimewa Surakarta berbeda dengan daerah lainnya. Status Daerah Istimewa Surakarta berbeda dengan beberapa Daerah Keistimewaan yang lain Seperti DIY dan NAD. Kalau di DIY, raja atau pemimpin kerajaan juga merupakan kepala daerah. Berbeda dengan konsep Daerah Istimewa Surakarta, kepala daerah tetap dipilih dari masyarakat, jadi ada dua kepemimpinan yang mengatur jalannya Daerah Istimewa Surakarta. Kepala Daerah+Pemerintahan dan Kepala Pemerintahan.¹⁹ Faktor yang mempengaruhi kekuasaan Mangkunegara VIII adalah faktor militer. Karena di istana mangkunegara sendiri terdapat pasukan militer yang bernama Rumeksopuro. Dan faktor lainnya adalah kewibawaan dari

¹⁹ Imam Samroni. 2010. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ditinjau dari Perspektif, Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis*. Yogyakarta: Pura Pustaka.hal 278-279

Mangkunegara VIII sendiri. Walaupun Mangkunegara VIII sendiri masih muda, belum berpengalaman dan mendapat banyak kritikan, akan tetapi Mangkunegara VIII mempunyai kecakapan dan hal itu terjadi ketika Mangkunegara VIII memaklumkan swapraja.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan disusun oleh penulis untuk memberi pemahaman dan untuk mempermudah dalam pembacaan. Sistematika dalam penelitian terdiri dari lima bab yang mana tersusun dari bab satu dengan bab lain sampai bab akhir yang saling berkaitan serta sama lain. Supaya menciptakan kesinambungan dan keselarasan antara bab satu dengan bab selanjutnya, sehingga menjadi satu kesatuan.

BAB I Merupakan bagian Pendahuluan yang akan menjelaskan mulai dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bagian pembahasan yang menguraikan Sistem Swapraja Mangkunegaran Sebelum Revolusi, Pemerintah dan Politik Birokrasi Tradisional Mangkunegaran, Kondisi Ekonomi dan Sosial Praja Mangkunegaran Sebelum Kemerdekaan.

BAB III Berisi menguraikan Swapraja Mangkunegaran Sepanjang tahun 1946, Barisan Banteng dan Respon Masyarakat Surakarta, Serangan Pertama gerakan Anti Swapraja, Serangan Kedua gerakan Anti Swapraja, Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mangkunegaran, Kondisi Politik di Mangkunegaran, Menjelang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta.

BAB IV Berisi tentang Pembentukan Kotamadya Surakarta dan Proses Pengakuan oleh Mangkunegaran, Penghapusan Status Daerah Istimewa, Respon Mangkunegaran VIII terhadap situasi yang terjadi setelah penghapusan DIS, Menyerahnya Mangkunegara VIII dan Pengakuan Kedaulatan NKRI.

BAB V Merupakan bagian penutup yang akan memaparkan kesimpulan terhadap apa yang sudah tertuang dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

Sistem Swapraja Mangkunegaran Sebelum Revolusi

A. Pemerintah dan Politik Birokrasi Tradisional Mangkunegaran

Sistem swapraja merupakan sistem yang sangat istimewa dikalangan kerajaan khususnya bagi seorang raja.²⁰ Sistem tersebut sudah ada pada zaman kolonial belanda, setiap raja mempunyai hak swapraja yang digunakan raja dalam pemerintahannya. Secara pengertian swapraja dapat diartikan sebagai tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah kerajaan tersebut berasal dari pemberian kolonial Belanda untuk seorang raja agar tanah tersebut bisa dikelola. Namun tanah swapraja tersebut terbagi dalam beberapa wilayah, hal ini tidak terlepas dari perjanjian dan campur tangan pemerintahan kolonial Belanda. Kedua penguasa di Surakarta yakni Kasunanan dan Mangkunegaran mendapatkan bagian masing-masing. Kasunanan sendiri mendapatkan 4/5 wilayah tanah swapraja sedangkan Mangkunegaran mendapatkan sisanya. Wilayah Kasunanan sendiri meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen. Sedangkan Wilayah Mangkunegaran sendiri meliputi Karanganyar, Wonogiri dan Baturetno. Terbaginya daerah Swapraja tersebut membuat kekuasaan raja semakin sempit. Kedudukan raja mangkunegaran sendiri misalnya, kedudukan kekuasaan raja mangkunegaran di daerah Swapraja sendiri diimbangi oleh seorang Gubernur dari pemerintah Hindia Belanda, sesuai dengan perjanjian bahwa daerah Swapraja

²⁰ M. Solly Lubis. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni. Hal 104.

mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri. Swapraja dilihat dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Swapraja dengan kontrak panjang, yaitu perjanjian yang mengikat dan membatasi kekuasaan swapraja dan memberi kelonggaran pada pemerintah pusat.
2. Swapraja dengan kontrak pendek, yaitu berisi keterangan bahwa swapraja mengakui kedaulatan negara dan akan tunduk akan perintah.

Dilihat dari segi hukum tersebut diatas maka daerah swapraja Surakarta tergolong swapraja dengan kontrak panjang, karena perjanjian yang dibuat secara turun-temurun dan berlaku terus.²¹

Pada suatu struktur pemerintahan negara meliputi berbagai lembaga kekuasaan mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan dalam istilah ini sekaligus tercakup ke dalam segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenangnya masing-masing dan menghasilkan tatanan pemerintahan yang baik.²² Dan struktur ini terlihat jelas pada struktur birokrasi Praja Mangkunegaran. Pada masa pemerintahan Mangkunegara III struktur birokrasi tersebut masih dalam kondisi yang belum cukup baik, hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Mangkunegara III terjadi peperangan dan struktur birokrasinya juga masih bersifat sederhana. Semua tugas wewenang, kewajiban dan tanggung jawab masih dipegang

²¹ Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono dan Restu Gunawan. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya. Hal 124-125

²² M. Solly Lubis. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni. Hal 104.

oleh Mangkunegaran. Meskipun pada masa pemerintahan Mangkunegaran I sampai Mangkunegaran III belum cukup baik struktur birokrasinya, namun mereka terus melakukan upaya perubahan dalam struktur birokrasi. Dan pada akhirnya Mangkunegaran III berhasil melakukan perubahan dan penyempurnaan struktur birokrasi Praja Mangkunegaaran.

Struktur birokrasi tradisional ini dipegang oleh para putra sentana dan para kerabat kerajaan atau dikenal dengan istilah *priyayi*. Pada masa tersebut paham feodalisme mulai tertanam sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Secara hierarki dan tradisional struktur birokrasi tersebut terbagi dalam berbagai lapisan:²³

1. Golongan Raja dan keluarga raja (sentana dalem).
2. Golongan Pegawai dan pejabat kerajaan (abdi dalem).
3. Golongan Rakyat biasa (kawula dalem).²⁴

1. Birokrasi Tradisional Mangkunegara tahun 1867

Di dalam struktur birokrasi pemerintahan Praja Mangkunegaran juga terdiri dari beberapa kawedanan. Dan Kawedanan inilah yang bertugas bertanggung jawab dalam pemerintahannya. Dan Kawedanan sendiri juga terdiri dari beberapa kemantren yang dibagi dalam tugasnya masing-masing yang diantaranya:

²³ Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono dan Restu Gunawan. Op. Cit. Hal 28

²⁴ George. D. Larson. 1990. *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta : UGM Press. Hal 23.

A. Kawedanan Amongpraja, pembantunya terdiri dari semua *Wadana* dan Kemantrennya terdiri dari:

1. Sastra Lukita, pekerjaannya yaitu menulis dan menghitung. Adapun kewajiban dari Sastra Lukita yaitu mengetahui tutur kata, mengetahui kesastraan dan menyimpan surat rahasia.
2. Reksa Pustaka, pekerjaannya yaitu merawat dan menata surat yang penting. Adapun kewajibannya yaitu mengingatkan para *Bekel* mengenai perilaku yang biasa berlaku di Mangkunegaran dan menyimpan rahasia.
3. Pamong Siswa, pekerjaannya yaitu melatih kepandaian dan kesustraan. Adapun kewajibannya yaitu untuk menuntut ilmu dan meningkatkan pengetahuan.

B. Kawedanan Reksapraja, kawedanan ini berfungsi sebagai Kantor Pengadilan Mangkunegaran. Pembantunya terdiri dari anggota *Rat Pradata*. Dan kemantrennya terdiri dari:

1. Polisi, pekerjaannya yaitu menerima laporan perkara.
2. Margatama, pekerjaannya yaitu memperbaiki jalan, tanggul, jembatan dan sebagainya.
3. Jaksa, pekerjaannya yaitu memberikan keadilan orang yang berselisih. Kewajibannya yaitu menjalankan isi surat peraturan negara dan memimpin pengadilan.

C. Kawedanan Kartapraja, kawedanan ini berfungsi sebagai kantor administrasi. Kawedanan ini memiliki pembantu yaitu Hoofd Administratur.

Dan kemantrennya terdiri dari:

1. Kartausaha atau para administratur, pekerjaannya yaitu mengusahakan kenaikan agar penghasilan Mangkunegaran makin maju.
2. Martanimpuna, pekerjaannya yaitu menerima uang pajak dan uang pendapatan negara (Mangkunegaran).

D. Kawedanan Martapraja, kawedanan ini berfungsi sebagai pemegang uang kerajaan. Kawedanan Martapraja ini mempunyai satu kemantren, yaitu:

1. Reksadana, pekerjaannya yaitu merawat dan mengetahui jumlah uang yang masuk pada bendahara.

E. Kawedanan Kartipraja, kawedanan ini berfungsi sebagai penata pekerjaan di kerajaan Mangkunegaran. Kawedanan ini memiliki satu kemantren yaitu:

1. Kartipura, pekerjaannya yaitu memelihara tata ruang kota dan menangani masalah kebakaran.²⁵

F. Kawedanan Reksa Wibawa, kawedanan ini berfungsi sebagai pelaksana perintah kerajaan. Kawedanan ini memiliki kemantren yaitu:

1. Reksa Warastra, pekerjaannya yaitu merawat dan menjaga senjata seperti keris, tombak dan pedang.
2. Reksa Wahana, pekerjaannya yaitu memelihara semua kendaraan dan seluruh perlengkapannya.

²⁵ S. Margana. 2004. *Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 379-381

3. Reksa Busana, pekerjaannya yaitu menyimpan dan menyediakan pakaian dan perhiasan prajurit.
 4. Langen Praja, pekerjaannya yaitu merawat gamelan, alat-alat kesenian dan wayang.
- G. Kawedanan Mandrapura, mempunyai tugas sebagai kebersihan dan kerapian keraton atau sebagai penghias rumah sang raja. Kawedanan ini memiliki kemantren yaitu:
1. Mandrasana, pekerjaannya yaitu merawat dan membersihkan perabot rumah tangga.
 2. Reksa Pradipta, pekerjaannya yaitu menyiapkan, memelihara dan merawat lampu-lampu khususnya lampu-lampu istana Mangkunegaran..
 3. Subapandaya, pekerjaannya yaitu menyiapkan dan menata hidangan minuman dan makanan.
 4. Reksa Sunggata, pekerjaannya menyiapkan, menata dan menyajikan hidangan makanan dan minuman dari makan pagi sampai makan malam khususnya dalam pesta kerajaan.
- H. Kawedanan Pura Baksana, kawedanan ini memiliki tugas yaitu berfungsi sebagai penanggung jawab dalam urusan makanan dalam kerajaan. Kawedanan ini memiliki kemantren yaitu:
1. Reksa Baksana, pekerjaannya yaitu membersihkan dan membereskan suatu hidangan apabila makanan tersebut sudah selesai dimakan oleh sang raja maupun tamu kerajaan.

2. Wreksa Pandaya, pekerjaannya yaitu menyediakan kayu jati yang akan digunakan Mangkunegaran sebagai penghias perabot istana dan juga digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak.
 3. Tarulata, pekerjaannya yaitu menyiapkan penyediaan berupa daun sirih dan padi. Kewajibannya yaitu mengetahui jumlah timbangan dan mengetahui barang siapa yang harus dibagikan, serta mengetahui berapa jumlah pemakaian biaya yang benar.
- I. Kawedanan Yogiswara, kawedanan ini memiliki tugas yaitu berfungsi sebagai pemanjat doa atau pemimpin doa dalam istana kerajaan. Kawedanan ini memiliki kemantren yaitu:
1. Ketib, pekerjaannya yaitu menikahkan seseorang yang ingin menikah dan serta menyiapkan dan menata perlengkapan bagi orang yang sudah meninggal.
 2. Naib, pekerjaannya yaitu berwenang menyelesaikan perkara perceraian, wasiyat, ahli waris dengan cara damai.
 3. Mardikan, pekerjaannya yaitu berwenang mengajar ngaji dan agama, serta menjaga dan memelihara makam dan *Petilasan* (tempat keramat).
 4. Ulama, pekerjaannya yaitu membaca doa-doa pada upacara resmi, mengurus zakat berupa zakat fitrah dan harta, serta membagikan zakat fitrah tersebut kepada fakir dan miskin.

Adapun semua Wadana tadi, tugasnya menjadi penasehat serta mengetahui dan melaksanakan pekerjaan Kamantren-nya sendiri-sendiri dengan semua anak buahnya, kewajibannya mencintai dan menjaga rakyat, serta melaksanakan kehendak dan bertanggung jawab atas wilayahnya.

2. Reorganisasi

Reorganisasi merupakan dasar pembaharuan yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan di pedesaan atas sistem yang sebelumnya berjalan. Pada tahun 1910 dan awal 1920-an reorganisasi atau reformasi administrasi dan agraria dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah Vorstenlanden. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama bersifat ideologis. Pada era Politik Etis, gagasan orang bahwa harus bebas dari keterikatan pada tanah, dan bahwa harus ada pemisahan antara orang yang menikmati hasil tanah dan kekuatan atas orang-orang yang hidup di atas tanah tersebut menjadi tidak terpisahkan dan dalam hal itu, situasi pertanian di vorstenlanden kelihatan seperti sebuah sistem "pertengahan" bawaan dari masa tanam paksa pada abad XIX. Faktor kedua adalah dorongan dari negeri Hindia pada masa etis menuju standarisasi, pemusatan rasionalisasi dan ekspansi. Perubahan terjadi pada mesin administrasi yang semula dijalankan oleh patih, maka pada dekade pertama abad XX, para *Residen* Belanda merasa puas dengan pengawasan terhadap kedudukan tertinggi. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Van Wijk seorang Residen Surakarta yang mengundurkan diri bahwa selama masa jabatannya arus dokumen pemerintah mengalami perubahan. Para bupati mulai menyampaikan laporan kepada residen atau asisten residen, dan bukan kepada patih. Birokrasi administrasi dari Kasunanan dan

Mangkunegaran saat ini masih membentuk jaringan patron-klien. Sebagaimana yang diamati oleh Van Wijk, hanya reorganisasi yang dapat melancarkan mesin administrasi dengan memberi jalan bagi Residen Belanda untuk melancarkan intervensi langsung terhadap pekerjaan seperti rekrutmen, pengelolaan personil, penggajian, dan masalah keuangan secara umum.²⁶

Reorganisasi memiliki tujuan untuk mengintegrasikan tanah-tanah yang terpecah dan terpotong-potong menjadi sebuah areal perkebunan yang luas. Ada empat tindakan yang diambil dalam melaksanakan reorganisasi ini, yaitu (1) Penghapusan sistem *apanage* atau *lungguh*; (2) Pembentukan desa sebagai unit administrasi; (3) Memberikan hak-hak penggunaan tanah yang jelas kepada petani; dan (4) Memperbaiki aturan sewa tanah.²⁷

Tindakan untuk menghapus sistem *lungguh* dilaksanakan pada tahun 1917 di Kasultanan dan tahun 1918 di Kasunanan. Para pemegang *lungguh* sebagai gantinya mendapat gaji dan upah dalam bentuk tunai, sedangkan perkebunan dan petani harus membayar pajak dan sewa tanah kepada kas kerajaan. Seiring dengan hilangnya tanah *lungguh*, maka lenyap pula para *bekel*. Jabatan itu dihapus dan orang-orangnya mendapat *bumi pituwas* atau tanah pensiun. Di Kasunanan, *bekel* mendapat seperempat *bau* dari *bumi pituwas*, hasil yang dapat dinikmatinya selama hidup. Setelah meninggal,

²⁶ R. T. M. Husodo Pringgokusumo. 1989. *Memori Van Overgave*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 39-40

²⁷ Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 96.

bagian tanahnya dikembalikan kepada kelurahan yang baru terbentuk dan dimasukkan ke dalam kas kelurahan.²⁸

Tindakan kedua dari rasionalisasi adalah pembentukan kelurahan sebagai unit administratif, yang menggantikan *bekel* sebagai "komunitas desa". Ketika membentuk sebuah desa, ada empat prinsip yang harus diikuti, yaitu (1) Batas desa sebisa mungkin mengikuti batas alam. (2) Sebuah desa harus terdiri dari 80 sampai 150 *kuli kenceng*, sehingga para pegawai desa yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan yang memuaskan terhadap penduduk desa. (3) Tanah gaji (*lungguh*) bagi para pegawai dan *bumi pituwas* bagi para *bekel* harus terletak di dalam desa tempat mereka menetap atau tinggal. (4) Semua *kuli kenceng* harus mendapat tanah yang dapat ditanami dalam jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan kesuburan tanahnya. Tanah yang diberikan kepada *kuli kenceng* harus dibagi menjadi dua wilayah perkebunan, satu untuk tanaman petani dan satu untuk tanaman perkebunan.²⁹

Dengan prinsip-prinsip seperti ini, 1.226 kelurahan dibentuk di Kasunanan dan 738 di Mangkunegaran, sampai saat berakhirnya reorganisasi. Semua tanah kini milik kelurahan. Tanah yang digolongkan dan digunakan oleh *lungguh* untuk para pegawai kelurahan adalah lurah, carik, *kamitua*, *modin*, *ulu-ulu*, dan *kabayan*. Setiap pegawai mendapat *lungguh* 4,5 *bau* untuk sang lurah, 2,25 *bau* untuk cariknya, dan 1,0 *bau* untuk pegawai lainnya. Tanah *lungguh*, seperti juga *bumi pituwas* dibebaskan dari pajak dan sewa tanah oleh perkebunan. Para pegawai kelurahan itu juga dibebaskan dari

²⁸ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Hal 45

²⁹ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Hal 46.

herediensten dan *desadiensten*. Walaupun semua pegawai ditunjuk dari kalangan bekas *bekel*, hanya satu dari tiga bekas *bekel* yang bisa jadi pegawai kelurahan. Bekas *bekel* yang terpilih menjadi pegawai kelurahan mengontrol bidang tanah yang luas dan bebas pajak, disamping menikmati hak istimewa. Sementara itu bekas *bekel* yang tidak terpilih hanya mendapat seperempat *bau bumi pituwas*. Oleh karena itu, reorganisasi menghasilkan ketidakpuasan yang sangat kuat diantara bekas *bekel* yang gagal menjadi pegawai kelurahan. Ketidakpuasan ini menjadi gerakan protes yang sering terjadi pada tahun 1919 dan tahun 1920 di *vorstenlanden*.³⁰

Ketiga, dengan pembentukan kelurahan, hak penggunaan tanah komunal diserahkan kepada penduduk, sementara penguasaan tanahnya ada ditangan penguasa dan pemiliknya ada pada kelurahan. Dengan begitu, tanah komunal desa dibagi-bagi menjadi bidang-bidang kecil sebesar setengah *bau* dan hak penggunaannya diberikan kepada penduduk. Penduduk yang diberi hak menggunakan tanah ini disamping perumahan disebut *kuli kenceng*. Konsekuensi dari kedudukan sebagai *kuli kenceng*, maka ia harus berkewajiban menyerahkan tenaganya untuk kelurahan, memelihara jembatan, bendungan maupun ronda malam, bila tidak melaksanakan maka akan dipenjara atau kehilangan statusnya sebagai *kuli kenceng*.

Keempat, dibawah aturan sewa tanah yang baru, yang dikeluarkan tahun 1938, perkebunan menyewa tanah bukan dari pemegang *lungguh* tapi dari kerajaan. Perkebunan yang secara sukarela menanggihkan kontraknya dengan pemegang *lungguh*

³⁰ Takahashi Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal 17.

membuat perjanjian sewa tanah yang baru dengan kerajaan. Dibawah aturan-aturan yang baru mereka menyewa tanah selama 50 tahun dan dapat menggunakan tenaga kerja yang dibayar dari *kuli kenceng* selama lima tahun dengan persyaratan yang diajukan oleh negara.³¹

Dari keempat tindakan ini menurut para residen Belanda merupakan obat mujarab yang dapat menyembuhkan kelumpuhan di pedesaan dan menjamin *rust in orde* di daerah *vorstenlanden*. Tetapi kenyataannya berbeda. Usaha ini sama sekali tidak manjur dan tidak memperbaiki kondisi yang digerakkan oleh perkebunan Belanda. Meskipun diterapkan aturan sewa tanah yang baru, struktur konflik antara petani dan perkebunan tidak berubah. Konflik antara petani dan perkebunan selama reorganisasi berputar pada tiga persoalan yaitu jumlah sewa, pelanggaran kerja paksa yang dibayar, dan jumlah upah yang dibayar kepada pekerja tersebut. Aturan sewa tanah yang baru, menghapus kerja paksa dan menggantikannya dengan sistem buruh bebas, tetapi konflik disekitar buruh *kasepen* dan *glidig* lebih rendah daripada pendapatan yang mungkin mereka peroleh jika menanam padi tanpa perkebunan, konflik selalu mungkin muncul antara petani dan perkebunan, dan makin tajam karena perlakuan *opzicter* Belanda yang sewenang-wenang dan arogan terhadap petani.³²

Berbeda antara struktur konflik antara petani dan perkebunan, hubungan petani dan kerajaan mengalami perubahan yang mendasar karena adanya reorganisasi. Dihapusnya sistem *lungguh* dan *bekel* berarti berakhirnya hubungan pribadi dan timbal balik antara

³¹ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Hal 47.

³² Takahashi Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Hal 19

pemegang *lungguh* dan *bekel* serta kulinya secara institusional. Pembentukan kelurahan administratif dilandaskan pada gagasan yang sama sekali berbeda dari gagasan tentang desa komperatif. Sementara ka *bekelan* dibentuk atas hubungan *diadik* antara *bekel* dan kulinya, kelurahan administratif adalah badan usaha dengan wilayah tertentu, yang dimana setiap kuli memiliki kesempatan menggunakan tanah komunal yang sama dikelola oleh sebuah badan pengurus, yaitu administrasi kelurahan. Tetapi badan pengurus ini tidak bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Negaralah yang menunjuk mereka dan memberikan tanah gaji. Desa administrasi bertindak sebagai eselon terendah dari negara sehingga tidak dapat bertindak menentang perkebunan. Pada akhirnya pihak petani yang dirugikan, bahkan menurut Shiraishi reorganisasi membawa perubahan yang justru menempatkan petani pada posisi dimana kewajibannya pada negara dan perkebunan dapat dijalankan secara efektif dan diawasi ketat oleh kelurahan dan negara.³³

B. Kondisi Ekonomi dan Sosial Praja Mangkunegaran Sebelum Kemerdekaan

1) Ekonomi Perkebunan Kopi

Penanaman kopi di daerah Mangkunegaran agaknya sudah lama berlangsung. Kira-kira pada tahun 1814 dimulai penanaman kopi dalam skala besar. Bibit yang digunakan dari "kebun kopi kuno" yaitu daerah Gondosini di Bulukerto. Kemudian ikut menangani juga Pangeran Ario Gondokusumo, yang menjadi Mangkunegoro

³³ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Hal 49

IV, ketika itu masih menjabat patih. Produk itu oleh kebanyakan pemilik apanage yang disemaikan di tanah-tanah mereka. Pada tahun 1833 dapat diberitahukan, bahwa produk kopi tersebut diteruskan ke kebun-kebun, yang ditanam dengan kerja rodi, dirawat dan dipetik, dan juga pengirimannya dilakukan dengan kerja tanpa upah. Dan hasilnya kira-kira 750-950 kuintal per tahun. Pendapatan yang diterima negara itu dari kopi. Kopi tersebut tergantung pada banyaknya dan harganya, jadi tidak dapat dipastikan seluruhnya. Namun selang dari tahun ke tahun ternyata kopi juga harus dilihat dari kualitasnya. Dari tahun ke tahun produk kopi meningkat, hal ini dikarenakan dengan adanya permintaan pasar bebas dan harga beli yang tetap. Dan hal lain yang menjadikan komoditi kopi terbesar di Mangkunegaran adalah meluasnya perkebunan kopi di daerah Tawangmangu dan Wonogiri.³⁴

2) Perkebunan Tebu

Seperti yang telah disebutkan, bahwa selama akhir abad XIX merupakan masa pertumbuhan perkebunan tebu di swapraja Mangkunegaran, dan selanjutnya awal abad XX sebagai masa perkembangannya. Pada dasawarsa terakhir abad XIX telah terlihat arah keberhasilan perkebunan tebu, sehingga sejak tahun 1900 sektor ini tampak kuat diantara berbagai perkebunan Mangkunegaran. Bertambah kuatnya usaha perkebunan tebu didorong oleh kondisi pasaran dunia yang makin baik, rasionalisasi pengelolaan perkebunan, yaitu dengan adanya upaya penghematan biaya dan management yang ketat, serta dukungan modal dari korporasi perusahaan.

³⁴ H.R.Soetomo. 2000. *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan Di Daerah Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 13.

Kedua perusahaan gula Mangkunegaran, baik Tasikmadu maupun Colomadu, mengalami perkembangan yang cukup stabil sejak 1900-1912. Jumlah produksi gula pada masa itu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diterima secara meyakinkan. Sistem proses penanaman tebu didasarkan petunjuk-petunjuk perusahaan gula. Sistem penanaman tebu menggunakan sistem siklus atau giliran. Dalam bahasa lokal sistem ini dinamakan sistem *glebagan*. Oleh karena tanah yang dijadikan areal tebu terbagi ke dalam tiga persil, maka proses penanaman pun terjadi tiga kali secara bergiliran. Bila persil atau bidang tanah pertama ditanam tebu, maka bidang lainnya ditanam padi atau palawija. Demikian seterusnya secara bergiliran, dengan selisih waktu yang telah ditentukan. Siklus ini dikenal sebagai siklus tiga tahunan.³⁵

3) Tembakau

Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Mangkunegara V adalah budidaya tembakau. Karena tertarik pada harga tinggi yang dicapai di Eropa untuk beberapa jenis tembakau maka budidaya tembakau akan diusahakan lagi. Untuk itu digunakan tenaga kerja dari Jatisrono (Keduwang) yang dahulu bekerja diperkebunan tembakau. Panen tembakau pertama kalinya berkualitas jelek dari tanah seluas 18 hektar. Walaupun panen tembakau yang pertama gagal dengan berkualitas rendah, Mangkunegara tidak gentar dan melanjutkan usahanya tersebut. Pada tahun 1887 tanaman tersebut diperluas lagi sampai 150 hektar. Perusahaan tembakau ini

³⁵ Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih. 1993. *Laporan Penelitian Perkebunan Tebu dan Petani di Mangkunegaran Pada Masa Belanda*. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Veteran Sukoharjo. Hal 20-29.

dikelola oleh J.B Vogel, bekas inspektur budidaya kopi yang juga salah satu penasihat raja. Perkiraan Vogel mengenai keuntungan yang sangat besar menimbulkan rasa optimisme pada raja. Namun pada kenyataannya, budidaya tembakau ini mengalami kegagalan yang disebabkan karena ditangani oleh orang yang tidak ahli.³⁶

a) Teh

Penanaman teh juga hasilnya tidak banyak. Mereka mencoba menanam teh di desa Kalisoro dan Ngimoroto yang berada di Kawedanan Tawangmangu. Dengan tanah seluas kira-kira 30 hektar, mereka mencoba menanam teh dibawah pengawasan J.B Vogel. Namun percobaan ini hanya berlangsung beberapa tahun dan dianggap gagal. Pada tahun 1874 penanaman teh di daerah tersebut dihentikan.

b) Kina

Sekitar tahun 1874 Mangkunegara sendiri berangan-angan untuk menanam tanaman kina. Dikirimlah dua orang pejabatnya ditugaskan ke Garut agar mempelajari tanaman kina dan disana mereka mempelajari tanaman kina selama setahun. Sesudahnya mereka selesai ditugaskan mereka melakukan survei ke tempat mana yang cocok untuk ditanami tanaman kina. Terpilihlah kedua desa yaitu Kalisoro dan Nglurah di Kecamatan Tawangmangu. Pada tahun 1877 dimulailah

³⁶ Ary Emawati Bayu Prastiwi. 2011. *Kebijakan Ekonomi Mangkunegaran*. Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jurusan IPS Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 82.

menanam kina, diluas tanah sekitar 100 hektar. Namun laba yang diterima sangat sedikit dan tanaman ini juga rentan terhadap serangan hama.³⁷

2) Ekonomi Pertanian

Sebagai suatu negara tradisional, bidang pertanian dan penguasaan tanah merupakan hal yang terpenting bagi Praja Mangkunegaran. Hal ini tentu saja bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan jalannya roda perekonomian dan kerajaan itu, sebab sebagaimana telah kita lihat bahwa sumber keuangan Praja Mangkunegaran juga berasal dari bidang-bidang lain, terutama industri. Dalam tatanan negara tradisional, sebagaimana telah banyak diketahui, semua tanah adalah milik raja dan rakyat hanya berhak meminjam. Proses peminjaman tanah ini untuk sebagian besar tidak berjalan secara langsung, tetapi melalui penguasaan atau pejabat dibawah raja yang memegang tanah *apanage*. Para pemegang *apanage* menerima separuh hasil panen dari 1/5 tanah *apanage*, sedangkan raja berhak atas separuh hasil panen dari 4/5 tanah itu dalam bentuk hasil tanaman.³⁸

Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 raja dan pemegang *apanage* banyak menyewakan tanahnya kepada orang-orang Eropa dan China. Para penyewa itu menerima dari raja atau para pemegang *apanage*, hak-hak yang sama atas pegawai rendahan dan para petani seperti yang dimiliki para pemegang *apanage* dulu. Sistem persewaan tanah ini dinamakan *landhuur*. Akan tetapi, karena telah terjadi penyelewengan-penyelewengan, pada tahun 1844 dikeluarkan peraturan yang

³⁷ H.R. Soetomo. 2000. *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan Di Daerah Mangkunegaran*. Hal 23

³⁸ G. P. Rouffear. 1983. *Swapraja diterjemahkan oleh M. H. Pringgokusumo, Surakarta*. Hal 68-72.

menghentikan hak-hak dari pejabat yang menyewakanya.³⁹ Pada tahun 1912 di Surakarta, termasuk Mangkunegaran, diadakan perubahan agraria secara besar-besaran. Perubahan itu menyangkut aturan tentang pengambilalihan *Domein Verklaring* (pernyataan sebagai hak milik) dari hukum agraria pada tanah-tanah yang langsung dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Dengan peraturan baru ini, Praja Mangkunegaran mendapat keuntungan dalam kepemilikan tanah, karena berdasarkan peraturan baru itu, yang menjadi tanah-tanah diluar itu. Oleh karena itu berdasarkan hukum Jawa bahwa raja merupakan pemilik semua tanah di negerinya, dan dengan didukung oleh *Gouvernement Ordonantie*, maka tanah-tanah yang tidak digarap dan ditanami menjadi milik raja. Tanah pertanian, padang penggembalaan, dan tanah pekarangan jatuh ke tangan desa yang memilikinya secara komunal, dengan bagian-bagian tetap dari mereka.⁴⁰

Untuk melaksanakan rencananya itu, dimulailah dengan pencatatan penduduk kota Mangkunegaran terutama yang akan diberi hak atas tanah berdasarkan kadaster dan pendaftaran atas tanah. Mulai tahun 1918 usaha ini dilanjutkan untuk penduduk di daerah Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri sehingga banyak dikeluarkan surat hak atas tanah.

Untuk keperluan ini pada tahun 1926 telah dilakukan pemetaan, baik di Surakarta (13.806 rumah), Wonogiri (923 rumah), maupun Karanganyar (244 rumah). Setelah perjuangan pemilikan atas rumah di kota-kota, kemudian

³⁹ A.K. Pringgodigdo. 1938. *Lahir Serta Tumbuhnya Kerajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 34-35

⁴⁰ Dr. Th. M. Metz. 1939. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 40.

dilanjutkan di desa-desa di wilayah Mangkunegaran. Bagi para petani, perubahan hak garap menjadi hak milik ini merupakan suatu keuntungan yang besar sekali karena mereka menjadi lebih bersemangat dalam mengerjakan areal tanahnya. Sayang sekali usaha-usaha ini mengalami banyak hambatan setelah terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1930.⁴¹

Perhatian pemerintah Mangkunegaran terhadap persoalan pertanian, selain melalui peraturan agraria, juga melalui perbaikan cara bertani. Untuk keperluan ini telah dibentuk suatu staf pertanian yang terdiri dari pegawai tinggi dan rendah yang bertugas mengawasi dan memajukan pertanian di Mangkunegaran, menasehati petani, dan menganjurkan mereka agar menggunakan cara-cara yang modern dalam pengolahan lahan pertanian. Walaupun sebagian besar pegawai ini diangkat oleh Gupermen, dalam pelaksanaannya banyak didukung oleh Praja Mangkunegaran. Banyak anggaran yang telah dikeluarkan untuk melakukan penyelidikan di desa-desa dan kebun percobaan. Di Mangkunegaran terdapat beberapa kebun percobaan untuk bermacam-macam buah, misalnya di Bulukerta untuk tanaman jeruk keprok, Baturetna dan Colomadu untuk berbagai jenis mangga, dan di Sanggrahan untuk pisang. Berbeda dengan bidang lainnya yang menyediakan dana yang luar biasa, untuk bidang pertanian ini tidak disediakan dana yang luar biasa. Dana yang dipergunakan untuk penyuluhan, percobaan penanaman, dan lain sebagainya diambilkan dari dana yang anggaran biasa (rutin) Praja Mangkunegaran serta bantuan-bantuan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan demikian, walaupun

⁴¹ Dr. Th. M. Metz. 1939. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 35-36

angka-angka dalam anggaran pertanian Praja Mangkunegaran itu kecil, sesungguhnya perhatian praja terhadap pertanian rakyat cukup besar.⁴²

3. Kehutanan

Secara alamiah Mangkunegaran memang dikaruniai daerah-daerah yang terdiri atas hutan, terutama di daerah-daerah yang terdiri atas hutan, terutama di daerah Wonogiri dan sebagian di Karanganyar, yakni di daerah Tawangmangu, di lereng kaki Gunung Lawu. Ketika di wilayah lain di Jawa dilaksanakan *Cultuur Stelsel* (Tanam Paksa) sebagian besar hutan, terutama di daerah Wonogiri dihapus karena dipergunakan untuk perluasan. Dengan penggundulan hutan pada masa itu, ekologis di daerah itu menjadi terganggu. Akibatnya kemudian segera terjadi penebangan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon hutan sebagai lahan pertanian. Tanah-tanah miring kemudian dibuat petak-petak tegalan untuk penanaman tanaman pangan dan kurang diperhatikan adanya pohon penahan pengikis air hujan. Akibatnya banyak terjadi erosi. Bunga tanah yang memungkinkan kesuburan tanah telah dibawa aliran air menuju daerah-daerah di lembah sungai. Hal semacam ini berlangsung dalam waktu puluhan tahun yang berakibat penggundulan hutan semakin luas. Hingga akhir abad ke-19 belum ada usaha-usaha untuk melakukan reboisasi di setiap lahan yang digarap para petani itu.⁴³

Pada tanggal 21 Februari 1917 dilakukan Pencanangan reboisasi oleh Mangkunegara VII dengan dinyatakan sebagai tindakan untuk kepentingan umum.

⁴² Dr. Th. M. Metz. 1939. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Hal 39-40

⁴³ *Ibid* hal 75

Untuk mendukung usaha reboisasi itu, di daerah hutan Wonogiri untuk tiap-tiap kompleks hutan dibuatkan jalan setapak yang cukup banyak, setelah dibuat jalan kuda dari Biting ke Bandung, yang melalui daerah yang amat berat. Di daerah-daerah rendah, yakni yang tingginya 300-400 meter di atas permukaan laut, ditanami pohon jati, sedangkan di daerah yang letaknya lebih tinggi ditanami pohon lamtoro (*leucaea glauca*) secara berbaris untuk menambah kesuburan tanah agar dapat melakukan reboisasi. Tanaman lamtoro yang merupakan tanaman pendahulu itu kemudian diganti dengan tanaman jati. Pada tahun 1917 itu hutan tersebut telah mengalami penambahan sekitar 237 hektar.⁴⁴

Pemerintah Mangkunegaran menyadari bahwa pengusahaan hutan itu mahal dan setiap tahun disubsidi sekitar f 150.000. Sehubungan dengan hal itu, mulai 1 Maret 1923 seluruh pengusahaan hutan diadakan reorganisasi dengan mengeluarkan urusan kehutanan dalam urusan Dana Milik, kemudian menjadikannya jawatan tersendiri, yakni menjadi seorang *Oppper houtvester*.⁴⁵

Suatu cara yang baik agar rakyat menaruh perhatian pada pembuatan hutan ialah dengan memberinya tanah dengan cuma-cuma untuk dijadikan tegalan, tetapi sementara itu ia juga harus menanam benih-benih pohon untuk hutan. Cara ini dimulai pada tahun 1925, dan karena petani tegalan itu diberi izin memilih sendiri tanahnya. Setelah mereka terbiasa dengan mengerjakan tegalan, mereka kemudian meminta tanah-tanah yang baru.

⁴⁴ Ibid hal 202

⁴⁵ Dr. Th. M. Metz. 1939. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Hal 61

Maka dengan ini tanah yang mereka garap kurang baik, hal itu dapat memungkinkan untuk direboisasi. Karena tanah yang paling gersang hanya dapat dikombinasi dengan tanah yang baik, maka tanah ini pun bisa dijadikan hutan.⁴⁶

Dampak dari reboisasi besar-besaran di wilayah Mangkunegaran selama beberapa dasawarsa itu telah memulihkan keseimbangan ekologi di wilayah Mangkunegaran. Komisi pengawas hutan (comissie van berheer) menulis pada tahun 1923 bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dalam ekologi di wilayah hutan Mangkunegaran. Dikatakan bahwa pada sekitar tahun 1911 di wilayah Wonogiri, dari 3.000 sumber air, 2.100 diantaranya kering dan 800 lagi debitnya berkurang. Akan tetapi, sejak tahun 1923 telah banyak sumber air yang mengeluarkan airnya lagi. Pada tahun 1911 di Wonogiri hanya satu sumur yang kedalamannya 11 meter baru bisa mengeluarkan air, tetapi pada tahun itu sudah banyak sumur yang dalamnya hanya 5 meter sudah mengeluarkan air. Demikian pula tanah-tanah yang semula kelihatan gersang, ketika itu telah berubah menjadi tanah yang subur karena mengandung humus dan tersedia air yang cukup.⁴⁷

4. Aspek Sosial

Dalam kehidupan sosial Swapraja di Mangkunegaran sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh penduduk pribumi. Bahkan pendapatan rumah tangga mereka makin lama justru merosot secara riil atau kualitatif. Dalam konteks lokal di swapraja Mangkunegaran, kehidupan sosial-ekonomi penduduk

⁴⁶ Ibid hal 76

⁴⁷ Dr. Th. M. Metz. 1939. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Hal 78.

kebanyakan, terutama mayoritas petani, tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di *Vorstenlanden*. Berdasarkan penelitian Suhartono pendapatan petani sangat rendah sekali dengan beban pajak yang cukup besar. Karena pada saat itu sewa tanah untuk perkebunan tebu selama 18 bulan hanya f 90,-. Padahal upah yang diperoleh petani hanya 30-40 sen. Ini berarti antara pendapatan per hari hanya habis untuk hari itu juga, padahal mereka belum pasti akan memperoleh hasil sebesar itu.

Di sisi lain, para buruh perkebunan tebu rata-rata memperoleh penghasilan antara 20-35 sen per hari, dan ditambah kerja lembur diperoleh 22-40 sen, serta pekerja berat memperoleh 50 sen. Kuli perkebunan rata-rata mendapat upah sebesar 25-35 sen per hari dan kuli tebang tebu hanya memperoleh 8 sen. Besarnya upah buruh di perkebunan tebu swapraja relatif sejajar dengan di perkebunan tebu daerah Surabaya sebagaimana penelitian dari Uemura Yasuo. Pada tahun 1904 di daerah Surabaya upah buruh laki-laki sebesar f 0,25 dan wanita sebesar f 0,15 serta anak-anak sebesar f 0,10. Besar upah buruh sekian ini sebenarnya lebih rendah pada tahun 1880, dengan tingkat penurunan masing-masing sebesar f 0,05. Akibat yang terjadi ialah tetap buruknya kondisi ekonomi di *Vorstenlanden*. Mereka tetap berada dalam tingkat ekonomi subsisten. Seperti halnya secara umum di Asia Tenggara.⁴⁸

Dan suasana yang memprihatinkan inilah yang sebagaimana yang digambarkan oleh Van Kol diakibatkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penguasa kerajaan. Tentu saja, hal ini memperlemah kedudukan petani sehingga dimanfaatkan oleh para birokrat kerajaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

⁴⁸ *Naskah M.N. No. 1900*

Bahkan, boleh dikata bahwa kehidupan di atas suasana desa ditanggung oleh petani. Keadaan seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh "penguasa-penguasa" perkebunan.⁴⁹

a) Pendidikan

Sejak awal abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan untuk penduduk bumiputra di Tanah Air. Sistem pendidikan baru yang diperkenalkan didasarkan pada sistem pendidikan Barat yang berorientasi pada kompetensi untuk kepentingan duniawi dan kehidupan nyata. Pendidikan persekolahan yang bersifat klasikal dengan menggunakan kurikulum tertentu sesuai dengan jenis sekolah dan jenjang pendidikan menjadi pilihan bagi sekolah-sekolah pada masa Kolonial Belanda. Keluarga bangsawan di Mangkunegaran merupakan salah satu pihak yang juga harus mengikuti arus baru dalam dunia pendidikan ini. Pemerintah Mangkunegaran mengikuti pola Barat dalam pembangunan pendidikan. Pengageng Mangkunegaran, terutama Mangkunegara VI dan VII, memandang pendidikan merupakan kebutuhan mendesak agar rakyat Mangkunegaran tidak ketinggalan dengan arus modernisasi dan westernisasi pendidikan yang melanda Hindia Belanda ketika itu. Sehubungan dengan hal itu, di Mangkunegaran mulai banyak diadakan pembangunan pendidikan sejak awal abad ke-20. Pembangunan pendidikan itu antara lain pemberian motivasi untuk bersekolah, pendirian sarana dan prasarana sekolah, serta pemberian beasiswa bagi yang ingin ke sekolah tetapi

⁴⁹ Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Hal 39

mengalami kesulitan biaya. Usaha untuk menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan Barat, terutama dikalangan elite Mangkunegaran, hingga akhir abad ke-20 hanya beberapa saja. Misalnya putra Mangkunegara IV, putra Mangkunegara V dan Mangkunegara VI, memang pernah disekolahkan di sekolah Eropa, tetapi tidak sampai tamat, yang kemudian dididiknya sendiri sesuai dengan pendidikan keraton Jawa bertempat di Pendapa Istana Mangkunegaran.⁵⁰

Mulai awal abad ke-20, semangat orang Mangkunegaran, terutama dari kalangan keluarga priyayi untuk memasuki pendidikan Eropa semakin besar. Banyak para priyayi tingkat atas di Mangkunegaran yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah di Semarang, Magelang, Jogja, Madiun dan Surabaya. Mengingat kebutuhan pendidikan dikalangan rakyatnya itu, maka Mangkunegara VI yang semula kurang begitu tertarik pada pendidikan barat itu kemudian mulai memperhatikan pendidikan rakyatnya. Perhatian Mangkunegaran VI terhadap pendidikan itu berupa pendirian sekolah-sekolah Mangkunegaran yang mendapat pelajaran Eropa dan pendirian *Studiefonds*. Sekolah yang mula-mula didirikan adalah Sekolah Siswo. Sekolah ini kemudian pada tahun 1912 dijadikan Sekolah Nomor I (Angka Siji), yang kemudian pada tahun 1914 diubah menjadi H.I.S. Sementara itu pada tahun 1920 dibuatkanlah gedung baru untuk sekolah H.I.S karena untuk menampung semakin banyaknya siswa yang berkeinginan untuk masuk sekolah itu.

⁵⁰ Wasino. 2014. *Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hal 187-188.

Sementara itu, untuk Sekolah klas II, yang semula hanya menggunakan pengantar Bahasa Jawa, pada Masa Pemerintahan Mangkunegara VII ditambah dengan pelajaran Bahasa Belanda. Sekolah ini ditutup pada tahun 1923, dan diganti menjadi Hoishoud (Kursus Rumah Tangga). Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuan agar dapat menjadi ibu dan pemegang rumah tangga yang baik. Selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh Praja Mangkunegaran, di Kota Mangkunegaran juga banyak didirikan sekolah swasta. Praja Mangkunegaran melalui Mangkunegara VII banyak membantu pendirian dan pengembangan sekolah-sekolah itu. Adapun sekolah yang mendapat bantuan antara lain: Algemeen Nederlandsch Verbond, yang merupakan sekolah umum dan Sekolah gadis milik Solosche Van Deventer Vereeing.⁵¹

b) Stratifikasi Sosial

Sebagai pendukung kebudayaan Jawa, dalam masyarakat Mangkunegaran dikenal pula konsep hubungan *kawula gusti*. Bertumpu pada konsep itu, dalam masyarakat Mangkunegaran dikenal dua strata, yaitu panggede atau priyayi (golongan penguasa) dan wong cilik (rakyat). Penggolongan ini tidak didasarkan terutama dari segi ekonomi atau segi keunggulan kelahiran, tetapi dari segi pertuanan dan perhambaan dari *kawula* dengan bendahara dan tempat seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam konsep ini hak dan kewajiban masing-masing strata telah ditakdirkan. Kepercayaan seperti ini banyak peranannya dalam

⁵¹ Drs. Wasino, M. Hum. 1996. Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran 1900-1942. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 25-27.

mengikat hubungan antarmanusia, karena tiap-tiap pendukung keyakinan itu akan sadar hak dan kewajibannya masing-masing. Perkataan *pinesthi* (ditakdirkan) dan *tinitah* (dijadikan rakyat) membuat mesranya hubungan tuan-hamba itu. Dalam aturan main yang demikian, orang akan menerima status sosial yang mereka miliki, terutama karena faktor kelahiran dan hanya sedikit sekali disebabkan oleh usaha.⁵² Kata *kawula* dan *gusti* memiliki implikasi status sosial yang segregatif. Sebutan *kawula* berarti abdi atau hamba yang merupakan orang atau kelompok yang mendukung status yang rendah dalam masyarakat, sedangkan *gusti* atau tuan menduduki status yang tinggi dalam masyarakat.⁵³

Untuk menentukan posisi seseorang dalam masyarakat tradisional itu diperlukan dua karakter yaitu: (1) prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh hubungan darah seseorang dengan penguasa dan (2) posisi seseorang dalam hierarki birokrasi. Seseorang yang memenuhi kriteria ini disebut golongan elite, sedangkan mereka yang berada diluar golongan itu dianggap sebagai rakyat kebanyakan. Kriteria seperti ini juga berlaku pada masyarakat Mangkunegaran, paling tidak pada masa sebelum abad ke-20.⁵⁴

Prinsip hubungan tuan-hamba yang berpangkat pada konsep *kawula-gusti* itu pada awal abad ke-20 juga masih berlaku. Hanya saja konsep ini telah mengalami peningkatan cukup yang bersifat hierarkis menurun dari raja hingga kepala desa.

⁵² Wasino. 2014. *Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa*. Op.cit hal 40

⁵³ Darsiti Soeratman. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta tahun 1830-1839*. Yogyakarta: Taman Siswa. Hal 16

⁵⁴ Sartono Kartodirdjo. 1983. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hal 159

Prinsip tuan-hamba lebih banyak mengandung makna hubungan kerja sama dan koordinasi antara rakyat dan penguasanya. Penguasa ini tidak harus penguasa di tingkat pusat, yaitu raja, tetapi juga penguasa-penguasa ditataran yang lebih rendah. Akhirnya ditemukan hubungan hierarkis menurun bahwa bupati merupakan kawula raja, wedana kawula bupati, dan seterusnya sampai pada penguasa birokrasi yang paling rendah. Sementara itu, stratifikasi masyarakat dibagi menjadi dua yaitu *wong cilik* dan *panggede*.

Stratifikasi masyarakat Mangkunegaran hingga awal abad ke-20 lebih banyak didasarkan pada kriteria politik, yaitu tinggi rendahnya seseorang dalam birokrasi pemerintahan, dan asal keturunannya, atau tingkat kebangsawanannya. Mereka yang memenuhi salah satu atau semua kriteria itu dinamakan golongan elite, sedangkan yang diluar dinamakan non-elite atau rakyat kebanyakan. Berdasarkan kriteria itu, Adipati Mangkunegaran berada di puncak piramida masyarakat Mangkunegaran karena ia merupakan kepala pemerintahan dan sekaligus kepala *trah* Mangkunegaran. Dalam kehidupan sehari-hari, oleh para kawulanya, ia disebut dengan sebutan khusus, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Hario Mangkunegara. Kerabat dibawah Mangkunegaran adalah para anggota keluarga dari raja yang sedang berkuasa. Kelompok ini meliputi putra, menantu, dan ipar Mangkunegaran. Sementara itu, para kerabat raja yang sudah tidak berkuasa menduduki strata yang

lebih rendah daripada kerabat raja yang sedang berkuasa. Kelompok ini sering disebut sebagai *Sentana Dalem*.⁵⁵

Para putra sentana dalem ini memperoleh gelar pangeran, terutama yang lahir dari permaisuri. Tiap kerabat kerajaan berhak menerima gaji menurut skalanya sendiri-sendiri. Mereka boleh menggunakan simbol-simbol kebesaran sesuai dengan derajat sosial yang dibuktikan dengan jauh dekatnya hubungan mereka dengan raja. Simbol kebesaran berupa payung berwarna kuning, misalnya digunakan oleh putra-sentana dari permaisuri dan payung berwarna putih untuk mereka yang berasal dari keturunan selir. Dan ada hak istimewa yang diperoleh para putra ini adalah boleh mengangkat *demang* atau *rangga* setelah mendapat izin patih Mangkunegaran. Dan dibawah Mangkunegaran sendiri terdapat para pejabat sipil seperti bupati, patih, wedana dan mantri.⁵⁶

Selain para pejabat sipil juga terdapat jabatan kemiliteran. Sebagian punggawa Mangkunegaran ada yang berdinasti di dunia militer Mangkunegaran. Stratifikasi sosial dalam kelompok ini berdasarkan pada tingkat kepangkatan seseorang. Mereka yang menduduki pangkat militer tertinggi menduduki strata tertinggi dan yang berpangkat paling rendah menduduki strata paling rendah menduduki strata paling rendah. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua strata yaitu opsir dan bawahan. *Opsir* meliputi seseorang yang berpangkat mayor sampai kolonel, dan letnan sampai kapten, sedangkan bawahan meliputi sersan sampai ajudan opsir bawah dan *fuselir*

⁵⁵ Leslie H. Palmier. 1960. *Social Status and Power in Java*. University of London. Hal 41

⁵⁶ Moh. Dalyana. 1939. *Ketataprajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 89

sampai kopral atau anak buah. Akan tetapi, dalam kenyataannya sering kali seorang pejabat sipil juga menduduki jabatan militer, misalnya Adipati Mangkunegaran sendiri menjadi pemimpin militer di Mangkunegaran dengan pangkat kolonel. Diluar para pejabat tersebut baik dari kalangan sipil, militer, maupun para putra sentana raja mereka adalah rakyat. Mereka inilah yang sering disebut sebagai wong cilik atau kawula.⁵⁷

Dalam menjalankan pemerintahannya Mangkunegara VIII tidak sendirian, banyak sekali orang kepercayaannya untuk membantu Mangkunegara VIII dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu sentana dalem dan abdi dalem. Selain itu masih banyak lagi orang kepercayaan Mangkunegara VIII dalam menjalankan sistem pemerintahannya seperti, para staf pegawai-pegawai yang ahli dalam bidangnya masing-masing, keluarga kerajaan istana Mangkunegaran dan juga para Patih kerajaan istana Mangkunegaran.⁵⁸

⁵⁷ Darsiti, Soeratman. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta tahun 1830-1839*. *Op.cit* hal 8

⁵⁸ Dody Setiawan. 2013. *Biografi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VIII*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya. Hal 40

BAB III

Swapraja Mangkunegaran Sepanjang tahun 1945-1946

A. Barisan Banteng dan Respon Masyarakat Surakarta

Surakarta adalah salah satu pusat feodalisme di Jawa yang masih hidup sampai awal kemerdekaan. Mangkunegaran adalah kerajaan yang menjadi pusat dan mewarisi sisa feodalisme. Dua kerajaan ini ada didalam wilayah Surakarta yang tentu saja bermaksud melestarikan sistem feodal yang sudah berlaku beberapa abad. Akan tetapi iklim politik kemerdekaan menghendaki hilangnya monopoli yang hanya dinikmati golongan bangsawan yang dikuasai dua kerajaan itu. Oleh karena itu rakyat melakukan protes dan melahirkan gerakan antiswapraja. Dua kerajaan itu bukan hanya sebagai swapraja yang berdiri sendiri di luar RI, tetapi harus bergabung dan menanggalkan sistem feodal. Gerakan Pakasa adalah gerakan rakyat Surakarta yang menentang pelaksanaan swapraja yang merugikan rakyat.⁵⁹

Sebagai bagian dari revolusi sosial di Surakarta, aksi-aksi kekerasan yang menghebohkan masyarakat Surakarta adalah penculikan atas pembesar-pembesar keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Pada bulan Januari 1946, kekuatan kaum oposisi yang tergabung dalam Barisan Banteng menculik Susuhunan, Kanjeng Ratu dan Soerjohamidjojo.⁶⁰ Mereka didaulat tanpa meninggalkan sopan santun sedikit pun sebagai ciri khas yang terus melekat di kota ini, tetapi para penguasa itu tidak

⁵⁹ Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto. 2001. *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama. Hal 164.

⁶⁰ M. C. Riefls. 1981. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 335.

memperoleh hubungan dengan dunia luar selama beberapa hari untuk menyadarkan pada mereka tentang ketidaksenangan rakyat terhadap kraton.⁶¹

Setelah dirasa memahami kehendak rakyat, ketiga penguasa istana itu dibebaskan dengan sebuah pernyataan penyesalan dan keinginan untuk disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin nasional lewat panggilan ”bung”.⁶²

Aksi-aksi penculikan dan ancaman yang ditujukan kepada kraton menjadikan kedudukan kraton menjadi lemah. Terlebih lagi, kelompok-kelompok di beberapa daerah yang sebelumnya mendukung kraton menjadi kekuatan yang menolak keberadaan kraton. Kenyataan ini menjadikan kekuatan antiswapraja semakin kuat dan semakin sering melakukan konsolidasi dan tuntutan-tuntutan yang menginginkan hapusnya swapraja Surakarta. Pada tanggal 29 April 1946 lahir mosi dari Kepolisian, Angkatan Muda, Pamongpraja, GRI (Gerakan Rakyat Indonesia), dan Barisan Banteng yang berisi tuntutan agar Daerah Istimewa Surakarta dihapuskan dan berubah menjadi residensi.⁶³

Mengingat semakin lemahnya dukungan terhadap kraton dan munculnya mosi yang didukung oleh sebagian besar kekuatan yang berpengaruh di Surakarta ini menjadikan Susuhunan PB XII menyerah. Pada tanggal 30 April 1946, PB XII mengeluarkan pengumuman yang berisi kerelaan akan hilangnya swapraja Surakarta

⁶¹ Ben Anderson, op. *Cit*, hal 389.

⁶² Devy Ariyanti, 2013. *Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja Di Surakarta Tahun 1945-1946*. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia. Hal 9.

⁶³ A.H. Nasution. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid III*. Bandung: Angkasa. Hal 111-114.

dan menyerahkan semua urusan ini kepada pemerintah pusat.⁶⁴ Kesediaan Susuhunan ini tidak diikuti oleh Mangkunegara VIII, yang justru mempunyai sikap yang berlawanan dengan kehendak kekuatan-kekuatan yang antiswapraja.⁶⁵ Sikap pemerintahan Mangkunegaran tersebut menimbulkan reaksi keras dari pihak-pihak yang beroposisi terhadap kraton.⁶⁶ Pada tanggal 4 Mei 1946, KNI Daerah Kabupaten Kota Mangkunegaran mengeluarkan mosi yang mendesak agar pemerintahan Mangkunegaran melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat.⁶⁷

Pernyataan pemerintahan Mangkunegaran yang keras dan pengumuman Susuhunan yang "menghiba" telah mengundang perhatian pemerintah pusat. Selain itu, kepedulian pemerintah didasarkan pula pada begitu kuatnya pengaruh "kekacauan" di Surakarta terhadap keberadaan kabinet Syahrir di Yogyakarta. Menanggapi masalah ini, pemerintah pusat mempertaruhkan harga diri untuk mendukung kedua kraton Surakarta sebagai konsekuensi kedudukannya yang teroposisi sebagaimana kraton dioposisi oleh kelompok-kelompok yang sama. Selain itu, pemerintah pusat berusaha melindungi harta milik kraton dan juga pabrik-pabrik agar tidak jatuh ke tangan kaum oposisi pimpinan Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya.⁶⁸

⁶⁴ Dr. Soeyatno Kartodirdjo. 1982. *Revolusi Di Surakarta Tahun 1945-1946*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 3.

⁶⁵ Ibrahim Julianto, hal 155

⁶⁶ Ibid hal 156

⁶⁷ *Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1946*

⁶⁸ Ben Anderson, hal 420

Agar pengaruh oposisi dapat dialokasikan dan permasalahan swapraja segera diselesaikan maka pada tanggal 5 Mei 1946 pemerintah mengutus Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono untuk berunding dengan kekuatan-kekuatan antistapraja di Surakarta. Soedarsono mengusulkan pembentukan suatu dewan eksekutif yang diketuai oleh Susuhunan. Akan tetapi usulan itu ditolak oleh kekuatan-kekuatan antistapraja yang lebih menginginkan diadakannya pemilihan umum di Surakarta.⁶⁹ Menanggapi tuntutan ini, pada tanggal 17 Mei 1946 Dr. Soedarsono mengumumkan suatu panitia pemilihan untuk Surakarta yang diketuai oleh Subadio Sastrosatomo. Melihat komposisi kepanitiaan yang dikuasai oleh orang-orang pemerintah, maka golongan antistapraja bergolak lagi.⁷⁰ Markas daerah Barisan Banteng Surakarta tanggal 18 Mei 1946 mengeluarkan maklumat yang berbunyi:

”Kita Bangsa Indonesia yang merdeka hanya mengakui satu pemerintahan ialah pemerintahan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Paduka Yang Mulia Presiden Ir. Soekarno dan Paduka Yang Mulia Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Barang siapa yang tidak setia kepada pemerintah Republik Indonesia, boleh ditentukan bahwa ia adalah:

1. Penghianat bangsa dan negara.
2. Mata-mata musuh.
3. Perusak keamanan dan ketentraman.

⁶⁹ *Kedaulatan Rakyat*, 6 Mei 1946

⁷⁰ *Kedaulatan Rakyat*, 13 Mei 1946

Oleh karena itu barang siapa yang mengetahui orang-orang itu tidak peduli besar atau kecil yang bertindak demikian supaya melaporkan kepada yang berwajib ialah:

1. Polisi Republik.
2. Polisi Tentara.
3. Badan-badan perjuangan yang ada disitu yang selanjutnya akan meneruskan kepada yang berwajib.
4. Penghianat bangsa dan negara atau mata-mata musuh harus diberantas dan dihukum seberat-beratnya”.⁷¹

Maklumat yang dikeluarkan tersebut merangsang anggota-anggota Barisan Banteng yang ekstrim untuk bertindak sendiri dengan melakukan aksi penculikan terhadap tokoh-tokoh penting istana. Mereka yang berhasil diculik adalah Patih Sosrodiningrat, Mr. Notonagoro, Mr. Jaksonagoro, Mr. Suwidji, serta Kanjeng Raden Adipati Yudonagoro.⁷² Aksi penculikan itu dilanjutkan pula terhadap Susuhunan Paku Buwana XII beserta permaisuri dan ibundanya. Para pembesar kraton tersebut ditawan oleh Barisan Banteng di Kandang Menjangan Kartasura. Tokoh-tokoh penting istana Mangkunegaran tidak berhasil diculik karena dijaga ketat oleh pasukan kerajaan istana Mangkunegaran.⁷³ Pada saat situasi di Surakarta yang semakin gawat maka pemerintah mengangkat Soerjo sebagai wakil pemerintah di Surakarta menggantikan R.P Soeroso yang dianggap terlalu lemah. Pengangkatan Soerjo itu diumumkan lewat maklumat oleh dr. Soedarsono tanggal 23 Mei 1946, yang berisi sebagai berikut:

⁷¹ *Kedaulatan Rakyat 15 Mei 1946*

⁷² Mr. Soewidji. 1973. *Kisah Nyata di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta*. Semarang: Percetakan Universitas Satya Wacana. Hal 62

⁷³ *Ibid* hal 63

1. Menempatkan di Surakarta untuk sementara waktu seorang wakil pemerintah pusat yang menjalankan pemerintahan di seluruh daerah Surakarta. Wakil pemerintah ini diberi kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengembalikan suasana yang tentram di daerah Surakarta. Kewajiban ini diserahkan oleh Soerjo.
2. Sejalan dengan maksud tersebut diatas, akan diambil tindakan-tindakan yang layak terhadap orang-orang yang telah melanggar aturan-aturan pemerintah.⁷⁴

Soedarsono mengharapkan Soerjo mampu memecahkan persoalan di Surakarta dan bersedia bekerja sama terhadap upaya-upaya pemerintah. Untuk menjamin "kerja sama" mereka itu, ia memerintahkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi terutama Barisan Banteng.⁷⁵ Pada tanggal 23 Mei dan 24 Mei 1946, atas perintah Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono, terjadi penangkapan terhadap 12 orang penting antispapraja termasuk di dalamnya 4 orang pemimpin Barisan Banteng, yaitu Dr. Moewardi, Mangkusudiyono, Mulyadi Joyomartono, dan Hadisunarto. Tokoh-tokoh lain yang ditangkap adalah Projosudodo, Juwardi, Ronomarsono, Rojoketarto, Projonimpuno, Bojonagoro, Wignyosuwito dan Subandiyoko.⁷⁶

Sehubungan dengan penangkapan tersebut, Markas Barisan Banteng mengutus Sumokartiko, Citromargoso, Anwar Santoso dan Sutiyoso menghubungi pemimpin TRI di Yogyakarta.⁷⁷ Ternyata mereka tidak tahu menahu mengenai penangkapan tersebut.

Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar Republik Indonesia mengeluarkan

⁷⁴ Ibrahim Julianto, hal 161

⁷⁵ Ibrahim Julianto, hal 162

⁷⁶ Ibid hal 163

⁷⁷ Ben Anderson, hal 397.

pengumuman agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan para anggota Barisan Banteng. Pengumuman ini dirasakan sebagai rasa simpati Sudirman terhadap perjuangan Barisan Banteng. Adapun isi pengumuman tersebut adalah:”Berhubung dengan banyaknya pertanyaan terhadap markas tertinggi Tentara Republik Indonesia tentang penangkapan-penangkapan kepada para pemimpin yang terjadi di Solo pada tanggal 24 Mei 1946 malam, perlu diterangkan bahwa pihak tentara tidak turut campur sesuatu apa tentang hal itu, hendaknya umum maklum apa adanya”.⁷⁸

Dewan Menteri kemudian mengeluarkan pengumuman secara resmi untuk menghindari kesalahpahaman dan tuduh-tuduhan yang tidak benar mengenai penangkapan tersebut, sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut diambil atas keputusan rapat dewan menteri yang dihadiri oleh presiden dan wakil presiden.
2. Segala pengumuman-pengumuman resmi tentang soal Surakarta, yang tidak sesuai dengan pengumuman ini, dianggap tidak benar dan tidak sah, sebab pengumuman pemerintah menjadi tanggungan serta mengikat seluruh negara dan sekalian badan, serta alat-alat negara.⁷⁹

Sementara itu di Surakarta, penahanan Dr. Moewardi beserta rekan-rekannya menimbulkan badai yang dahsyat. Demonstrasi-demonstrasi kemarahan dimulai, yang memuncak dalam suatu rapat umum yang diselenggarakan bersama pada tanggal 28 Mei 1946 oleh Barisan Banteng. Sudiro, pejabat kepala Barisan Banteng,

⁷⁸ *Jogja, 23 Mei 1946*

⁷⁹ Ben Anderson, hal 424

memberikan batas waktu 48 jam kepada kabinet untuk melepaskan para tahanan. Jika tidak, ia mengancam untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan organisasinya yang mengandung arti bahwa ia tidak akan berusaha lagi mengendalikan para pengikutnya yang marah itu.⁸⁰ Soerjo berusaha campur tangan dan menenangkan kemarahan yang timbul di kedua belah pihak, tetapi ia tidak berhasil.⁸¹ Ultimatum Sudiro berhasil. Pada tanggal 31 Mei 1946 mengumumkan bahwa Moewardi, Hadisunarto, dan Mulyadi Joyomartono telah dibebaskan sebagai hasil pembahasan-pembahasan dengan Soerjo. Usaha pembebasan ini tiada lepas dari partisipasi Jenderal Sudirman yang sebelumnya telah dibujuk pemimpin-pemimpin Barisan Banteng untuk membebaskan tahanan itu.⁸²

Pembebasan ini merupakan pukulan yang berat terhadap pemerintah. Pukulan kejiwaan terhadap pemerintah itu diperparah dengan parade kemenangan besar-besaran yang diselenggarakan di Surakarta untuk merayakan kembalinya para tahanan politik itu dan dengan pengumuman Soerjo bahwa "dilarang keras melakukan penangkapan lagi di daerah Surakarta jika tidak ada persetujuannya". Dengan demikian, bukan hanya orang-orang antiswapraja itu nampaknya terjamin kekebalannya terhadap campur tangan pemerintah selanjutnya, melainkan juga Soerjo telah melepaskan dirinya dari tanggung jawab apa pun juga atas penahanan-penahanan tadi. Segera setelah dibebaskannya Moewardi dan kawan-kawannya, suatu sidang kabinet darurat dilangsungkan, dihadiri oleh presiden, wakil presiden,

⁸¹ Ibrahim Julianto, hal 161

⁸² *Antara*, 3 Juni 1946

Jenderal Sudirman, dan tokoh-tokoh penting lainnya, dalam mana suatu dibuat untuk menutupi rasa malu pemerintahan militer di Surakarta. Pemerintah militer yang dibentuk disebut Pemerintahan Daerah Rakyat dan Tentara (PDRT) yang diprakarsai oleh Kolonel Sutarto sebagai komandan divisi IV wilayah Surakarta dengan maklumat No. 1 tanggal 1 Juni 1946.⁸³

Dengan terbentuknya pemerintahan militer ini, maka pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran disatukan dibawah pimpinan tentara. Pemerintahan militer ini dijalankan oleh Badan Pekerja yang berjumlah 6 orang. Pada tanggal 2 Juni, Sutarto sendiri memimpin pelantikan "rezim" baru ini.⁸⁴

Setelah peristiwa ini pemerintah lebih berhati-hati terhadap kelompok oposisi. Tuntutan kelompok oposisi di Surakarta sepenuhnya dikabulkan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Peraturan Presiden tanggal 15 Juli No. 16/SD/1946 yang berbunyi:

"Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran untuk sementara waktu dipandang merupakan karesidenan sebelum susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang". Dengan peraturan tersebut maka kekuasaan kedua kraton Surakarta untuk sementara dibekukan. Hal ini berarti pula secara *de facto* dan *de jure* pemerintah swapraja Surakarta telah runtuh.⁸⁵

⁸³ Ibrahim Julianto, hal 164

⁸⁴ Antara, 3 Juni 1946

⁸⁵ Arsip MN VIII No. 1950

B. Serangan Pertama dari gerakan Anti Swapraja

Konflik tersebut bukan saja dari dalam istana saja, bahkan diluar istana konflik saja konfliknya semakin parah, bahkan keadaan pun semakin genting. Seketika keselamatan sang raja Mangkunegara VIII dalam bahaya, Mangkunegara VIII sendiri juga harus berpikir lagi dan mengatur strategi agar para pemberontak tidak bisa masuk ke gerbang istana Mangkunegara. Para pemberontak tersebut berasal dari pasukan Barisan Banteng yang tidak setuju dengan Mangkunegara VIII yang mempertahankan hak istimewa swapraja demi kekuasaan politik. Bahkan para pasukan Barisan Banteng tersebut sukses menculik raja Susuhunan XII beserta ibundanya dan berhasil membunuh patih kerajaan Kasunanan.⁸⁶ Serangan pertama terjadi pada tanggal 18 April 1946.⁸⁷ Dipimpin oleh seorang dokter yang juga tokoh penggerak revolusioner di Surakarta yaitu Dr. Moewardi. Dr. Moewardi beserta para pasukan Barisan Banteng sendiri kemudian bergerak ke istana Mangkunegaran guna untuk menculik raja Mangkunegara VIII. Tujuan mereka adalah menculik raja Mangkunegara VIII, mereka menjadikan Mangkunegara VIII menjadi sasaran, karena raja Mangkunegara VIII tersebut tidak mau melepaskan hak istimewanya. Hal inilah yang membuat para pasukan Barisan Banteng mengamuk dan ingin segera menculik sang raja tersebut. Seketika keselamatannya terancam dan keadaan

⁸⁶ H. Karkono Kamajaya. 1993. *Revolusi Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 11

⁸⁷ Ibrahim Julianto, hal 157.

di luar istana mulai mencekam, bahkan Mangkunegara VIII pun mulai berpikir dan mengatur strategi.⁸⁸

Mangkunegara VIII sendiri mulai berpikir dan siasat strategi pun dimulai. Mangkunegara VIII mulai menemukan caranya yaitu dengan menyuruh pasukan istana kerajaannya untuk mulai berjaga di luar istana dan Mangkunegara VIII juga menyuruh pasukan lainnya untuk berjaga mengelilingi luar istana Mangkunegara agar para pasukan Barisan Banteng tidak bisa masuk ke dalam istana. Strategi ini juga hasil dari pemikiran Mangkunegara VIII sendiri dan Mangkunegara VIII sendiri sudah mengetahui pergerakan pasukan Barisan Banteng sendiri bahwa yang menjadi sasaran adalah Mangkunegara VIII.⁸⁹

Setelah itu para pasukan Barisan Banteng tersebut bergerak ke istana Mangkunegaran. Setelah sesampainya di istana Mangkunegaran, para pasukan Barisan Banteng dikejutkan dengan para pasukan istana Mangkunegaran berjaga di luar istana dan mengelilingi setiap penjuru istana. Para pasukan militer istana tersebut dipersenjatai senjata lengkap. Namun hal tersebut tidak dipedulikan oleh para pasukan Barisan Banteng untuk menggempur dan masuk ke dalam istana guna menculik Mangkunegara VIII. Namun para pasukan militer istana pun tidak kalah gigihnya, bahkan para pasukan militer Mangkunegaran tersebut lebih sigap dalam menghadapi serangan pasukan Barisan Banteng. Bahkan serangan tembakan yang dibuat oleh para pasukan militer Mangkunegaran sangat berbahaya dan serangan

⁸⁸ Belda Ranika Rosiana. 2013. *Terbentuknya Birokrasi Modern Di Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 79-80

⁸⁹ Taufik Abdullah, dkk. 1983. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES. Hal 60

tersebut berhasil membuat para pasukan Barisan Banteng kocar-kacir.⁹⁰ Setelah membuat pasukan Barisan Banteng kocar-kacir dan berhamburan. Keadaan di istana Mangkunegaran mulai kondusif dan ini juga berkat kerja keras dari pasukan militer istana Mangkunegaran. Dan itu juga berkat strategi dari Mangkunegara VIII, walaupun usianya masih muda dan keadaan politik dan ekonomi istananya sedang hancur, Mangkunegara VIII mulai bisa berpikir secara jernih. Hal ini kembali lagi sifat dan karakter Mangkunegara VIII yang keras kepala, tetapi ia juga memiliki watak yang cerdas, bijaksana, memiliki intelektual yang baik dan Mangkunegara VIII juga memiliki kewibawaan yang baik.⁹¹

Setelah keadaan di istananya mulai kondusif dan tidak ada lagi pemberontakan, Mangkunegara VIII kembali angkat bicara dan menyampaikan beberapa hal-hal yang penting kepada para pegawainya di halaman istana Mangkunegaran. Mangkunegara VIII juga menyampaikan pengumuman yang kontroversial yang isinya yaitu Mangkunegara VIII tetap mempertahankan hak istimewanya lagi dan juga yang paling mengagetkan lagi adalah Mangkunegara telah mengeluarkan Maklumat Mangkunegara VIII yang membuat para pegawai dan masyarakat sekitar istana Mangkunegaran terkejut dengan pengumuman yang disampaikan Mangkunegara VIII.⁹² Maklumat tersebut berisi tentang Mangkunegara VIII ingin

⁹⁰ Belda Ranika Rosiana. 2013. *Terbentuknya Birokrasi Modern Di Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 79-80

⁹¹ Soebagijo I.N. 1981. *Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: Gunung Agung. Hal 163

⁹² Ibid 164

mempertahankan wilayah kekuasaannya dan ingin mempertahankan sistem politik feodal.⁹³

Hal tersebut membuat gesekan tersebut terjadi lagi dan hal ini juga dikhawatirkan para pegawai dan masyarakat sekitar mulai risau yaitu terjadinya pemberontakan lagi. Dan pengumuman tersebut sudah sampai ke beberapa kaum oposisi, dan kaum oposisi ini berada di Surakarta. Pemimpin kaum oposisi ini adalah Tan Malaka dan tujuan kaum oposisi ini memiliki tujuan yang sama yaitu tidak setuju dengan dibentuknya daerah istimewa dan mereka juga mendesak Mangkunegara VIII untuk melepaskan hak istimewanya. Kaum oposisi sendiri juga menjalin hubungan dengan gerakan Barisan Banteng pimpinan Dr. Moewardi.⁹⁴

Hal tersebut juga menjadi tambahan kekuatan bagi gerakan Barisan Banteng. Mereka juga saling bekerja sama untuk menculik dan menjatuhkan raja Mangkunegara VIII. Mereka kemudian bergerak menuju istana Mangkunegara VIII, ketika keselamatannya dalam bahaya, Mangkunegara sendiri berpikir dan menyusun strategi berjumlah sangat banyak dan hal itu juga menyulitkan Mangkunegara VIII untuk menyusun strategi. Mangkunegara VIII menyuruh pasukan militer istananya untuk berjaga mengelilingi penjuru istana dan perbedaan dari pasukan militer ini adalah setiap pasukannya lebih banyak dibandingkan yang pertama dan persenjataannya lebih lengkap dan para pasukan tersebut juga dibekali meriam.⁹⁵

⁹³ Ibrahim Julianto, hal 158

⁹⁴ Alfian. 1977. *Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian*. Prisma No. 8, Agustus 1977. Hal 57

⁹⁵ Soebagjo I.N. 1981. *Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: Gunung Agung. Hal 165

C. Serangan Kedua gerakan Anti Swapraja

Setelah menyatakan menyerah dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli yang berisi pembekuan status swapraja kraton dan menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan bahwa Mangkunegara VIII benar-benar menyerah dan hal itu juga diikuti oleh Susuhunan Paku Buwono XII.⁹⁶ Dan hal ini dikarenakan pemerintah pusat betul-betul serius ingin membekukan dan menghapus status swapraja kraton. Dengan ini juga pemerintah pusat ingin menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Dan hal ini juga yang membuat pemerintah pusat murka, karena Mangkunegara VIII tidak mau melepas hak istimewa swapraja.⁹⁷

Dan pemerintah pusat sendiri juga mengalami kesulitan karena Mangkunegara VIII memiliki sifat yang keras kepala. Dan dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli membuat Mangkunegara VIII pasrah dan menyerah. Dan menyerahnya Mangkunegara VIII juga diikuti oleh Susuhunan XII. Setelah Mangkunegara VIII menyatakan menyerah terhadap pemerintah pusat, Mangkunegara VIII juga mengeluarkan pengumuman yang berisi bahwa Mangkunegara VIII tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah pusat. Dan Mangkunegara VIII sendiri juga mengakui kedaulatan NKRI. Mangkunegara VIII juga bersumpah ikut bergabung dengan NKRI.⁹⁸ Pengumuman yang dikeluarkan oleh Mangkunegara VIII mendapat sambutan positif dari para pegawai istana

⁹⁶ Dra. Sri Yuliani Widyaningsih, M.Pd. 2012. *Sejarah Lokal Surakarta*. Hal 91

⁹⁷ F.X. Hadi Rudyatmo. 2013. *Daerah Istimewa Surakarta Dalam Pandangan Pemerintah Kota Surakarta*. Hal 10.

⁹⁸ Antony Reid. 1996. *Sejarah Nasional Indonesia*. hal 159

Mangkunegaran dan rakyat sekitar istana Mangkunegaran. Dan dengan ini selesailah Revolusi sosial di Praja Mangkunegaran yang menelan banyak korban jiwa dan merupakan peristiwa terkelam bagi Praja Mangkunegaran sendiri. Dan itu juga menandai tamatnya hak swapraja dan beberapa wilayah yang dahulunya merupakan kekuasaan dari Praja Mangkunegaran.⁹⁹

D. Kondisi Sosial dan Ekonomi Mangkunegaran

Kondisi Sosial Secara umum, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Mangkunegaran selama masa revolusi berada dalam keadaan yang menyedihkan. Pada masa awal revolusi, praktek-praktek eksploitasi ekonomi yang telah berlangsung selama masa pendudukan Jepang yang dikelola oleh kraton masih tetap bekerja dan mengorganisasikan penyerahan sumber-sumber ekonomi ke kraton.¹⁰⁰ Pada saat berlangsungnya revolusi sosial, kondisi perekonomian di Mangkunegaran sendiri sangat memprihatinkan, padahal sebelum tahun 1945-1946 kondisi perekonomian di Mangkunegaran baik-baik saja dan bahkan sumber kekayaannya sendiri berasal dari wilayah-wilayah daerah Mangkunegaran seperti Wonogiri dan Karanganyar. Sumber perekonomian Mangkunegaran sendiri berasal dari pertanian dan perkebunan. Dan satu lagi sumber perekonomian Mangkunegaran juga berasal dari hutan, karena diwilayah-wilayah kekuasaan Mangkunegara mempunyai hutan yang sangat luas dan hasilnya juga menjanjikan. Bahkan juga hasil perekonomian di

⁹⁹ F.X. Hadi Rudyatmo. 2013. *Daerah Istimewa Surakarta Dalam Pandangan Pemerintah Kota Surakarta*. Hal 9

¹⁰⁰ Ibrahim Julianto, hal 111

bidang kehutanan, Mangkunegara sukses mengekspor hasil hutan tersebut keluar negeri.¹⁰¹

Dan bahkan masyarakat di sekitar Mangkunegara sendiri hidup sejahtera dan bahagia pada saat tahun tersebut. Dan bahkan hasil pertanian di wilayah Mangkunegara sendiri mencapai 16.400 ton.¹⁰² Dari tahun-tahun sebelumnya hasil pertanian dan perkebunan mencapai 5000 ton dan hasil kesuksesan tersebut tidak lepas dari usaha-usaha dari kepemimpinan raja Mangkunegara dahulu.¹⁰³

Setelah bergantinya kepemimpinan dari Mangkunegara VII ke Mangkunegara VIII membuat keseimbangan pemerintahan mangkunegaran jadi goyah. Pergantian kepemimpinan itu terjadi ketika Mangkunegara VII meninggal dan mengangkat seorang putra mahkota raja yang masih muda. Ketika itu masa pengangkatan raja Mangkunegara VIII terjadi pada tahun 1945 dan saat itu juga kondisi ekonomi dan sosial Mangkunegara sangat kacau dan memprihatinkan. Dan pada saat itu juga usia raja Mangkunegara VIII sendiri masih sangat muda yaitu 19 tahun. Dengan usia yang sangat muda dan belum memiliki pengalaman, membuat pemerintahan mangkunegaran sendiri dalam keadaan yang darurat dan kacau.¹⁰⁴

Kekacauan sendiri juga berimbas pada bidang ekonomi. Dibidang ekonomi sendiri merupakan bidang yang paling utama di mangkunegaran, karena dibidang ini merupakan sumber penghasilan yang paling banyak menghasilkan uang. Kekacauan

¹⁰¹ Ibrahim Julianto, hal 66

¹⁰² Ibrahim Julianto, hal 111

¹⁰³ George Mc. Turnan Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Indonesia*. Surakarta: UNS Press. Hal 319.

¹⁰⁴ Ibid hal 320

tersebut terjadi dikarenakan adanya gerakan anti swapraja yang diketuai oleh Dr. Moewardi.¹⁰⁵ Kekacauan dan kekisruhan tersebut membuat sektor dibidang perekonomian mangkunegara tersendat dan kacau. Dibidang pertanian dan kehutanan misalnya, sektor ini merupakan sektor penting bagi roda perekonomian mangkunegara, dibidang pertanian sendiri biasanya mangkunegara menghasilkan ribuan hingga belasan ribu ton beras dan juga berton-ton palawija, namun ketika kerusuhan terjadi penghasilan disektor pertanian ini menurun drastis. Yang biasanya menghasilkan belasan ribu ton, namun dengan adanya gerakan anti swapraja menghasilkan setidaknya puluhan hingga ratusan kilo saja, begitu juga dengan palawija yang menghasilkan berton-ton, namun tinggal puluhan kilo saja. Dibidang kehutanan sendiri juga tak luput dari sorotan, dibidang ini biasanya mengekspor hasil-hasil hutan ke luar negeri, namun dengan adanya kekacauan tersebut hasilnya dibidang ini tersendat dan tidak bisa mengekspor kebutuhan diluar negeri. Dan hasilnya penghasilan dikedua bidang ini menurun drastis.¹⁰⁶

Selanjutnya bidang perekonomian lainnya yang paling disorot lagi adalah perkebunan. Dibidang perkebunan ini merupakan sektor yang paling sentral dan juga jantung perekonomian mangkunegaran. Sektor perkebunan sendiri memiliki penghasilan yang melimpah dan bahkan melampaui kedua sektor lainnya yaitu sektor pertanian dan kehutanan. Dan sektor ini adalah sektor yang paling banyak menghasilkan keuntungan. Sektor perkebunan sendiri terdiri dari teh, tebu dan kopi.

¹⁰⁵ Prof Dr. Suhartono. 2001. *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Laper Pustaka. Hal 164.

¹⁰⁶ Ibrahim Julianto, hal 67

Di sektor ini beberapa wilayah di Mangkunegaran mempunyai perkebunan yang sangat luas dan dikelilingi hamparan alam yang indah. Setelah adanya gerakan anti swapraja ini memberontak, maka perekonomian di sektor ini semakin rumit, hal ini membuat beberapa pabrik-pabrik di wilayah mangkunegaran berhenti dan perekonomian semakin tersendat.¹⁰⁷ Gerakan anti swapraja membuat raja Mangkunegara VIII semakin kewalahan akibat sektor perekonomian yang hancur total akibat pemberontakan dan ditambah lagi harga kebutuhan pokok di pasar semakin melonjak akibat krisis ekonomi dan membuat masyarakat sekitar wilayah Mangkunegaran diminta untuk bertahan hidup dengan seadanya.¹⁰⁸

Berikut tabel harga kebutuhan pokok di wilayah pasar Mangkunegaran.

Produksi (1 Kg)	Penetapan Pemerintah (1945)	Agustus 1945	Juni 1946
Beras	0,15	1,66	17,50
Gula	1,00	1,58	7,30
Garam	0,25	3,48	14,30
Daging	-	4,50-13,60	76-187,50
Kedelai	0,22	2,00	12,00
Minyak Kelapa	0,52	5,09	38,20

¹⁰⁹Ibrahim Julianto hal 113

¹⁰⁷ Ibrahim Julianto, hal 112.

¹⁰⁸ George Mc. Turnan Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Indonesia*. Hal 321

¹⁰⁹

Berdasarkan tabel diatas merupakan kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Mangkunegara. Hal inilah yang membuat masyarakat di sekitar wilayah Mangkunegaran semakin menderita dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Hal ini terjadi lantaran sektor perekonomian di Mangkunegaran sendiri sedang kacau dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan anti swapraja. Hal ini terjadi pada pertengahan 1945-1946 biasanya beras dan kebutuhan pokok lainnya merupakan kebutuhan yang paling utama karena suplai kebutuhan pokok tersebut berasal dari wilayah Mangkunegaran, namun pada pertengahan tahun tersebut beras dan kebutuhan pokok lainnya menjadi langka.¹¹⁰

Pertengahan 1946 kenaikan harga kebutuhan pokok sendiri mencapai 1000 persen. Hal ini jugalah yang membuat masyarakat menderita dan enggan membeli kebutuhan pokok di pasar. Parahnya lagi disebabkan oleh blokade dan pemberontakan gerakan anti swapraja yang tidak menyetujui dengan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Padahal permintaan kebutuhan pokok di sekitar Mangkunegaran sangat tinggi, hal ini dikarenakan penambahan penduduk di sekitar Mangkunegaran. Dan ditambah lagi yaitu distribusi kebutuhan pokok menjadi tersendat dan penyebabnya sama yaitu blokade dan pemberontakan gerakan anti swapraja.¹¹¹ Maka hal yang terjadi adalah rakyat diminta untuk bertahan dalam keadaan yang miskin dan semakin rakyat diminta untuk bertahan maka rakyat

¹¹⁰ George Mc. Turnan Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Indonesia*. Hal 323

¹¹¹ Ibrahim Julianto, hal 113

semakin memberontak dan hal terjadi adalah penjarahan yang terjadi di sekitar wilayah Mangkunegaran.¹¹²

Dan hal tersebut dilakukan karena rakyat sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang mereka alami, bahkan penjarahan tersebut dilakukan juga karena kehabisan stok bahan-bahan pokok, rakyat sendiri melakukan penjarahan ke berbagai tempat seperti toko dan swalayan. Sasarannya yang mereka jahar adalah toko milik orang-orang cina, rakyat sendiri menyangka bahwa toko milik orang-orang cina menimbun barang kebutuhan pokok rakyat sekitar Mangkunegaran. Dan rakyat sekitar Mangkunegaran sendiri tidak setuju dengan keputusan raja Mangkunegara yang dianggapnya kurang tepat. Mereka disuruh bertahan dengan keadaan yang miskin dan mengkhawatirkan dengan stok kebutuhan pokok yang menipis. Rakyat sendiri berpikiran bahwa dengan melakukan penjarahan ke toko-toko milik orang cina, kebutuhan mereka tercukupi, tapi hal tersebut juga tidak diinginkan oleh raja Mangkunegara VIII yaitu kericuhan antara rakyat sekitar Mangkunegaran dengan orang-orang cina. Dan hal yang terjadi ketika rakyat sudah mendapatkan barang kebutuhan pokok adalah penimbunan.¹¹³

Penimbunan barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh rakyat sekitar Mangkunegaran sendiri tidak masuk akal, bahkan mereka menimbun sebanyak ratusan kilo, dan ada juga rakyat menimbun barang kebutuhan pokok sendiri hingga ribuan kilo. Dan hal inilah yang dikhawatirkan juga oleh sang raja Mangkunegaran

¹¹² George Mc. Turnan Kahin, hal 324

¹¹³ Ibrahim Julianto, hal 111

VIII, rakyat akan bertindak seenaknya sendiri dan tidak menunggu keputusan dari raja Mangkunegara VIII. Usaha-usaha penimbunan barang dan tindakan-tindakan "penghukuman" yang dilakukan oleh beberapa laskar rakyat menimbulkan suasana yang semakin kacau. Agar kekacauan ini tidak semakin parah, maka Sudiro selaku pimpinan Dewan Pertahanan Daerah Surakarta mengeluarkan peraturan No. 5 tahun 1947 yang berisi ketentuan mengenai penimbunan barang. Peraturan itu melarang seseorang menyimpan bahan makanan lebih dari 15 kg. Bagi pengusaha yang mempunyai toko atau tempat usaha diperbolehkan menimbun bahan makanan sebanyak-banyaknya 500 kg untuk setiap jenis bahan makanan. Bahan makanan yang disimpan sudah terjual dalam jangka waktu lima hari dan apabila tidak terjual maka akan disita. Bagi pengusaha yang mempunyai perusahaan dilarang menimbun barang lebih dari 1000 kilogram dan kepemilikannya harus memiliki izin yang telah ditentukan.¹¹⁴

Upaya yang dilakukan oleh dewan pertahanan surakarta sendiri untuk melarang warga sekitar mangkunegaran sendiri untuk menimbun barang-barang kebutuhan pokok, namun hal tersebut tidak didengarkan warga sekitar, malah warga sendiri semakin membabi-buta dengan menjarah ke tempat-tempat yang menyimpan persediaan kebutuhan pokok.¹¹⁵ Pada saat itu juga kondisi di istana Mangkunegara sedang tidak baik-baik saja, hal ini dikarenakan perekonomian di istana Mangkunegara sendiri sedang mengalami penurunan dan pemasukan di bidang-bidang yang menjadi sektor utama di Mangkunegara sendiri mengalami defisit dan

¹¹⁴ Ibrahim Julianto, hal 112

¹¹⁵ *Arsip MN VIII No. 2436*

pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Mangkunegara berhenti yang disebabkan oleh pemberontakan anti swapraja.¹¹⁶

Kondisi yang menyedihkan tersebut membuat suasana di istana Mangkunegaran tidak harmonis. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah gaji para pegawai Mangkunegara yang belum dibayar dan itulah yang membuat sang raja Mangkunegara VIII tidak bisa berbuat apa-apa karena perekonomian di istananya sendiri sedang kacau. Namun bukan tanpa alasan Mangkunegara VIII sendiri harus berpikir keras untuk mengatasi masalah yang menimpa istananya maupun rakyat sekitar.¹¹⁷ Namun kondisi tersebut justru memaksa para pegawai Mangkunegara melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Para pegawai Mangkunegaran sendiri terpaksa meminjam sejumlah uang pembayarannya untuk memotong gaji tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu. Akibat dari besarnya pinjaman, seringkali para pegawai tidak menerima gaji karena sudah dipotong untuk melunasi hutangnya.¹¹⁸ Hal tersebut dilakukan para pegawai Mangkunegaran karena kebutuhan hidup mereka sehari-hari belum tercukupi dengan baik, alhasil para pegawai tersebut meminjam uang untuk memotong uang gaji bulanan mereka. Bukan para pegawai Mangkunegara saja yang meminjam uang, namun banyak sekali masyarakat sekitar wilayah Mangkunegaran meminjam uang ke bank-bank

¹¹⁶ Hari Nur Prasinta. 2009. *Pengaruh Kondisi Sosial-Politik Terhadap Kabupaten Martanimpoena*. Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 82.

¹¹⁷ George Mc. T. Kahin, *Op. Cit*, hal 318

¹¹⁸ Andi Nurma Utamawan. 2010. *Pemerintah Darurat Militer Surakarta Dan Dampaknya Terhadap Pemerintahan Kota Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 29

untuk mencukupi kebutuhan rakyat sendiri maupun melunasi hutang yang belum dibayar.

Berikut tabel jumlah pinjaman uang di bank-bank di sekitar Surakarta tahun 1946.

Jenis Bank	Jumlah Bank	Peminjam (Jiwa)	Uang yang dipinjam (Rupiah)	Rata-Rata Pinjaman per orang
1. Bank Pusat	1	-	-	-
2. Bank Pasar	18	28.489	1.156.325	40,59
3. Bank Kampung	42	33.442	710.406	21,24
Jumlah	61	61.931	1.886.734	30,91

¹¹⁹ Ibrahim Julianto hal 115

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa para pegawai Mangkunegaran dan masyarakat yang meminjam uang ke bank cukup banyak. Banyaknya peminjaman tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan para pegawai Mangkunegaran dan masyarakat sekitar yang tidak mampu tercukupi. Padahal, dalam situasi kesulitan ini, harapan-harapan untuk perbaikan penghasilan mustahil untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sang raja Mangkunegara VIII sendiri mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji pegawai Mangkunegaran. Namun di sisi lainnya para pegawai Mangkunegaran tetap menunjukkan kesetiaan kepada sang raja Mangkunegara VIII. Hal ini dikarenakan para pegawai tersebut dengan memotong uang gaji mereka dan

tetap bekerja kepada sang raja Mangkunegara VIII walaupun dalam keadaan kesulitan. Dan Mangkunegara VIII juga harus memikirkan rakyatnya dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam kondisi ekonomi sendiri rakyat harus meminjam uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun melunasi hutangnya. Dalam kondisi sosialnya sendiri masyarakat sekitar mengalami kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran. Dalam keadaan inilah sang raja Mangkunegara VIII kembali memikirkan hal ini dilakukan karena sang raja Mangkunegara VIII sendiri harus bersikap adil dan bijaksana walaupun ditengah kericuhan dan ketidakseimbangan politik yang disebabkan oleh gerakan anti swapraja.¹²⁰

E. Kondisi Politik Mangkunegaran

Kondisi politik di istana Mangkunegaran sendiri juga sedang kacau total, hal ini juga disebabkan dengan adanya gerakan anti swapraja yang dipimpin oleh Dr. Moewardi. Gerakan ini mempunyai tujuan yaitu tidak setuju dengan dibentuknya Daerah Istimewa. Hal tersebut dilakukan karena mereka sudah gerah dengan kepemimpinan dua tokoh pemimpin kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Pengangkatan kedua orang raja tersebut sangat tidak tepat, karena kedua raja tersebut masih berusia muda dan belum memiliki pengalaman, termasuk raja Mangkunegara VIII. Raja Mangkunegaran VIII merupakan tokoh yang paling diincar oleh gerakan anti swapraja. Hal ini ditunjukkan karena Mangkunegara VIII

¹²⁰ *Karkono Kamajaya, hal 5.*

ingin menjadi kepala daerah dan bersifat keras kepala.¹²¹ Hal inilah yang membuat marah para anggota gerakan anti swapraja, dan mereka bergerak menuju istana Mangkunegaran untuk menculik sang raja Mangkunegara VIII. Sang raja Mangkunegara VIII sendiri was-was dengan adanya kericuhan yang dilakukan oleh gerakan anti swapraja. Dan Mangkunegara VIII sendiri juga dibuat stress dengan kondisi politiknya di dalam istananya. Hal inilah yang menjadi pemicu gesekan baik itu di dalam istananya maupun luar istananya.¹²²

Kondisi yang tidak membaik ini membuat Mangkunegara VIII sendiri berpikir secara positif. Hal ini juga Mangkunegara VIII sendiri semakin kuat untuk menghadapi situasi kondisi yang terjadi baik itu di dalam istananya maupun di luar istananya. Mangkunegara sendiri juga memiliki karakter yang keras kepala, tetapi dia juga memiliki watak yang sangat cerdas, bijaksana dan mempunyai kewibawaan yang sangat baik. Dan Mangkunegara VIII juga tidak pasrah dengan keadaan politik di istananya, hal ini dibuktikan Mangkunegara VIII bisa memadamkan suasana kondisi politik di istananya yang sedang kacau. Setelah keadaan kondisi politik di istananya sudah selesai dipadamkan, lalu Mangkunegara VIII mengambil langkah dengan menyuruh pasukan kerajaannya untuk berjaga di luar istana guna untuk mencegah pemberontakan gerakan anti swapraja yang dipimpin oleh Dr. Moewardi. Dan langkah itu pun berhasil karena langkah kebijakan Mangkunegara VIII sudah sesuai, hal ini sudah sesuai direncanakan oleh Mangkunegara VIII yang menduga

¹²¹ Mawardi dan Yuliani. 1995. *Dinamika Revolusi Sosial Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 50.

¹²² Ibid hal 51

bahwa gerakan anti swapraja tersebut bergerak ke istana Mangkunegaran untuk menculik sang raja Mangkunegara VIII.¹²³

Ketika suasana dan kondisi istana sudah reda, lalu Mangkunegara VIII sendiri membuat pengumuman yang kontroversial. Pada tanggal 1 Mei 1946 Mangkunegara VIII mengeluarkan pengumuman yang isinya bahwa daerah Mangkunegaran tetap dipertahankan pihak konservatif sebagai daerah swapraja. Status ini tidak ingin terjadi perubahan, apalagi yang bertentangan dengan golongan konservatif tersebut.¹²⁴

Pengumuman yang dibuat oleh Mangkunegara VIII sendiri membuat tensi politik mulai memanas. Hal tersebut menimbulkan berbagai gesekan lagi, termasuk yang dilakukan oleh kaum oposisi yang berada di Surakarta. Kaum oposisi sendiri diketuai oleh Tan Malaka dan mereka juga menjalin hubungan dengan gerakan Barisan Banteng pimpinan Dr. Moewardi. Hal ini membuat kaum oposisi dan gerakan Barisan Banteng mengadakan rapat besar pada tanggal 9 Mei 1946. Tujuan dari rapat ini adalah membentuk badan legislatif secara demokratis dan melalui pemilihan langsung untuk menentukan anggotanya. Rapat ini juga mengkritik raja Mangkunegara VIII, karena sang raja sendiri telah mengeluarkan pengumuman yang dapat menimbulkan tensi politik kembali memanas. Pada saat selesai rapat itu Dr.

¹²³ *Karkono Kamajaya, hal 10.*

¹²⁴ *Ibrahim Julianto, hal 159*

Moewardi beserta 11 anak buahnya ditangkap karena memberikan kritik keras kepada raja Mangkunegara VIII.¹²⁵

Situasi tersebut membuat anggota gerakan kaum oposisi dan gerakan barisan banteng mengamuk. Mereka bergerak dengan massa yang sangat banyak dan hal ini membuat Mangkunegara VIII dalam bahaya. Akan tetapi Mangkunegara VIII tetap dengan sikap yang positif, Mangkunegara VIII mulai merancang rencana yang sama yakni menyuruh pasukan kerajaan Mangkunegaran VIII untuk berjaga di luar gerbang istana, tetapi ada yang membedakan yaitu kali ini pasukan kerajaannya dipersenjatai senjata lengkap dan di istana sendiri ada meriam yang bersedia untuk mencegah pemberontakan.¹²⁶

Dan situasi memanas tersebut terjadi pada tanggal 28 Mei 1946, beberapa demonstrasi kaum oposisi dan barisan banteng terus menggempur istana Mangkunegaran tetapi pasukan kerajaan istana Mangkunegaran tidak mau kalah dengan para demonstiran pasukan barisan banteng dan pasukan para kaum oposisi. Setelah para demonstiran tersebut berhasil dikalahkan, hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah RI sendiri memperingatkan sang raja Mangkunegara VIII untuk melepaskan hak istimewa tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Mangkunegara VIII. Hal ini membuat Mangkunegara VIII semakin kuat dengan mengeluarkan Maklumat dan membuat undang-undang baru yang isinya Mangkunegara VIII tetap berpegang pada

¹²⁵ Ben Anderson, hal 422

¹²⁶ Ibrahim Julianto, hal 164

prinsipnya yaitu tetap mempertahankan hak swapraja tersebut beserta wilayah kekuasaannya dan ingin menjadi kepala daerah.¹²⁷

F. Menjelang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta

Wacana pembentukan provinsi Surakarta yang mengemuka kembali mendapat sambutan yang cukup hangat, terutama dari kalangan politisi. Sebagaimana fakta empirik, terutama dari fakta-fakta ekonomis, hasil penelitian tersebut memang menunjukkan signifikansi yang cukup tinggi bagi kepentingan pembentukan provinsi. Namun, faktor ekonomis barulah salah satu indikator saja. Dan sejak dulu wilayah ini telah dikenal dengan potensi ekonominya. Meski tak dapat dipungkiri, bahwa sepanjang sejarah wilayah ini, potensi ekonomi yang dimiliki seringkali menjadi pemicu konflik sosial yang mengarah pada kerusuhan massal. Potensi ekonomi menjadi pisau bermata dua bagi wilayah ini. Oleh karenanya, pembentukan provinsi tak akan kuat bila hanya berpijak pada fakta-fakta empiris ekonomis. Faktor-faktor lainnya juga tak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan.¹²⁸

Surakarta wilayah yang bersejarah. Sehingga, pembentukan Kotamadya Surakarta sendiri pada mulanya dipelopori oleh kalangan intelektual dan politisi melalui gerakan antiswapraja. Hal ini berarti kalangan intelektual dan politisi berperan dalam mengurai sejarah kewilayahan Surakarta. Kaum intelektual dan politisi ketika itu merasa terpanggil untuk membawa Surakarta menjadi kota modern

¹²⁷ Ibrahim Julianto, hal 163

¹²⁸ Imam Samroni, dkk. 2010. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis & Yuridis*. Hal 268

sesuai dengan kebutuhan dan semangat pada zaman saat itu. Kini kalangan intelektual dan politisi mencoba memelopori kembali merekatkan wilayah Surakarta dengan format baru provinsi, sejalan dengan semangat zaman reformasi dewasa ini.¹²⁹

Untuk kepentingan ekonomis, memang cukup kondusif pembentukan provinsi Surakarta. Meski kita tidak berharap tidak akan lagi terjadi pengulangan-pengulangan sejarah dalam perkembangan wilayah Surakarta yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan semangat zaman dewasa ini. Sementara untuk membangun kohesivitas baru diantara daerah-daerah yang akan bergabung dengan provinsi Surakarta merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Sebab yang saat ini daerah-daerah eks Karesidenan Surakarta tengah dihadapkan pada konsolidasi internal dengan otonominya tersendiri. Terlebih lagi kota Surakarta setelah remuk redam oleh peristiwa kerusuhan. Kalangan intelektual dan politisi sendiri sebenarnya menunjukkan sikap yang berbeda atas peranannya terhadap sejarah wilayah Surakarta dengan memelopori provinsi. Sementara di masa lalu mereka berperan dalam mengurai wilayah Surakarta. Meski, hal ini bisa saja dinegosiasikan, apabila pembentukan provinsi memang membawa bobot kemaslahatan yang lebih besar bagi rakyat keseluruhan. Oleh karenanya, sudah selayaknya apabila wacana pembentukan provinsi diserahkan kepada kehendak rakyat di daerah-daerah, sebagai manifestasi pembangunan wilayah yang partisipatif

¹²⁹ Ibid hal 271

BAB IV

Pembentukan Kotamadya Surakarta dan Proses Pengakuan oleh Mangkunegaran

Akhir-akhir tahun 1946 isu tentang pembentukan provinsi Surakarta mulai ramai diperbincangkan lagi. Ketika itu seluruh masyarakat Surakarta menuntut agar hal yang sama juga diterapkan di Surakarta, mengingat faktor kesejarahan yang sama. Keinginan untuk membentuk Daerah Istimewa Surakarta atau Provinsi Surakarta merupakan aspirasi politik masyarakat di era demokrasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena maraknya pemekaran daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi. Pemekaran daerah sendiri adalah pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Kedua, adanya saluran untuk melakukan upaya hukum terkait masalah ini, yakni Mahkamah Konstitusi dan dalam beberapa hal gugatan terhadap Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah faktor sejarah. Ini merupakan faktor terpenting, karena pada masa awal berdirinya Republik Indonesia, juga pernah berdiri Provinsi Daerah Istimewa Surakarta yang hanya berusia kurang dari satu tahun dari Agustus 1945 sampai 16 Juni 1946. Pihak yang menuntut dibentuknya Provinsi Surakarta berpandangan bahwa antara Surakarta dan Yogyakarta mempunyai aspek historis yang relatif sama, maka ketika Yogyakarta dijadikan daerah istimewa, maka Surakarta pun juga harus dijadikan daerah istimewa. Penetapan status ini dilakukan Presiden Soekarno sebagai balas jasa atas

pengakuan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran yang menyatakan wilayah mereka merupakan bagian dari Republik Indonesia.¹³⁰

Bahkan secara yuridis sendiri daerah istimewa dijamin oleh konstitusi. Provinsi Surakarta sendiri bukan seperti daerah pemekaran, tapi berada di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Ia mengatakan pembentukan Provinsi Surakarta dimulai sejak keluarnya maklumat dari Mangkunegara VIII tanggal 1 September, yang mengatakan bahwa Mangkunegaran bergabung dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.¹³¹

Dalam maklumat ini, Mangkunegara VIII mengatakan bahwa Provinsi Surakarta yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri dibelakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Disebutkannya juga bahwa hubungan Provinsi Surakarta dengan Pemerintah Pusat bersifat langsung. Selain itu keberadaan Provinsi Daerah Istimewa ini pernah disebutkan dalam UUD 1948, baik sebelum UUD itu diamandemen (pasal 18), begitu juga setelah UUD ini diamandemen (pasal 18 b). Kembali lagi soal Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa itu merupakan kewenangan dan urusan pemerintah pusat.¹³²

¹³⁰ <https://banyumasdaily.com/2022/02/15/menakar-kembali-daerah-istimewa-surakarta/>

¹³¹ Supomo. 1957. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 287

¹³² Antony Reid. 1996. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 123

A. Penghapusan Status Daerah Istimewa 15 Juli 1946

Pada dasarnya terdapat beberapa aturan yang mengatur dan merekomendasikan tentang adanya pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Keputusan itu diambil dengan adanya maklumat Paku Buwono XII dan maklumat Mangkunegara VIII pada tanggal 1 September, serta keputusan pemerintah Nomor 16/SDI/1946 mengenai Daerah Istimewa Surakarta. Seperti diketahui, pada tanggal 16 Juni 1946, Karesidenan Surakarta secara resmi mulai berdiri. Oleh pemerintah Republik Indonesia, Karesidenan Surakarta ini membawahi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Terbentuknya Karesidenan Surakarta, yang diikuti berdirinya Pemerintahan Daerah Kotamadya Surakarta, secara otomatis menghapus kekuatan Kasunanan dan Mangkunegara.¹³³

Nasib tragis yang menimpa Kasunanan dan Mangkunegara ini berbanding terbalik dengan Kasultanan dan Pakualaman, yang kini masih menikmati status sebagai daerah istimewa. Surakarta sebenarnya pernah mencicipi status sebagai daerah istimewa. Namun bedanya, jika daerah Kasultanan dan Pakualaman hingga kini masih menikmati status sebagai daerah istimewa, namun Surakarta ini hanya menikmati status sebagai daerah istimewa hingga ditetapkannya Karesidenan Surakarta dan Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.¹³⁴

Dalam buku Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta yang ditulis Nurhajarini, menguraikan bahwa proses delegitimasi sudah sejak lama hingga pada bulan

¹³³ Soemarsaid Moertono, 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa*. Jakarta: Obor. Hal 90

¹³⁴ Imam Samroni, dkk. Hal 281

Oktober 1945 yaitu terbentuknya gerakan anti swapraja yang menggelar kampanye antimonarki di Surakarta. Gerakan tersebut tak hanya memasang target untuk membubarkan Daerah Istimewa Surakarta, tapi juga menginginkan dicabutnya *privilege* yang dimiliki Kasunanan dan Mangkunegaran. Dari kelompok ini juga berharap bisa mengambilalih tanah-tanah yang dikuasai oleh dua kerajaan tersebut.¹³⁵

Dari kelompok inilah yang ada dibalik serangkaian kerusuhan, kekacauan dan kekerasan di Surakarta, dimana bupati-bupati di Daerah Istimewa Surakarta yang masih berkerabat dengan Kasunanan maupun Mangkunegara diturunkan oleh massa. Pemerintah RI akhirnya turun tangan dan mengirimkan pasukan militer untuk berjaga di Daerah Istimewa Surakarta. Kemudian, pemerintah RI menindaklanjuti situasi yang tak terkendali ini dengan mengeluarkan Undang-undang pembentukan Karesidenan Surakarta dan Kotamadya Surakarta. Daerah Istimewa Surakarta pun berakhir dengan tragis. Dan hal ini membuat proses delegitimasi berjalan lebih cepat. Hal lain tersebut membuat cepatnya delegitimasi itu adalah keberadaan Surakarta sebagai salah satu daerah yang paling bergolak sepanjang periode kemerdekaan dan pergerakan nasional.¹³⁶

Bahwa konsep Daerah Istimewa Surakarta sendiri sangat berbeda dengan konsep pemekaran daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan

¹³⁵ Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono dan Restu Gunawan. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya. Hal 125

¹³⁶ Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hal 60

Daerah. Status DIS sendiri ini berbeda dengan daerah keistimewaan yang ada di Indonesia. Kalau di daerah keistimewaan yang lain di Indonesia, bahwa raja atau pemimpin kerajaan juga merupakan kepala daerah. Berbeda dengan konsep DIS, karena kepala daerah tetap dipilih dari masyarakat, jadi ada dua kepemimpinan yang akan mengatur jalannya pemerintahan DIS.¹³⁷

Namun kalau Kota Surakarta menjadi daerah istimewa, maka seluruh anggaran ditanggung oleh daerah sendiri atau dengan kata lain harus mandiri secara penuh. Dalam kenyataannya, memang tidak mudah merealisasikan pembentukan DIS karena banyak sekali masyarakat yang mempertanyakannya. Dan masyarakat sendiri juga bersikap ragu-ragu dan salah satunya sikap yang diutarakan masyarakat sendiri adalah tidak tersedianya sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah di eks Karesidenan Surakarta. Bahkan munculnya feodalisme sendiri juga menjadi kekhawatiran masyarakat tersendiri atas wacana pembentukan DIS, Pendapat seperti ini pun rasanya naif karena pada dasarnya masyarakat di wilayah eks Karesidenan Surakarta bukanlah masyarakat yang bodoh dan tidak memahami persoalan yang terjadi. Masyarakat sendiri juga akan tahu apakah pembentukan DIS ini demi kepentingan rakyat atau politik. Dan persoalan yang terbesar sendiri adalah kekhawatiran apabila pembentukan Provinsi Surakarta jatuh ke tangan elite politik. Dan hal inilah yang harus dihindari dan selalu diawasi oleh masyarakat. Pembentukan daerah ini juga harus benar-benar berada ditangan masyarakat yang mewakilkan pada kelompok yang memahami kondisi riil wilayah ini, memiliki visi

¹³⁷ G. Moedjanto. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 80

dan misi demi kesejahteraan rakyat. Apabila itu tidak terjadi, maka pembentukan DIS akan melahirkan persoalan baru yaitu perebutan kekuasaan.¹³⁸

B. Respon Politik Mangkunegaran VIII setelah penghapusan DIS

Gerakan anti swapraja yang berlarut-larut menjadi semakin seru dengan tambahan kekuatan yang berasal dari pihak oposisi yang membuat wadah yang tergabung dalam persatuan perjuangan ke Surakarta. Dan kehadiran pihak oposisi ke Surakarta membuat situasi politik semakin kacau. Persatuan perjuangan dari pihak oposisi dan akhirnya membangkitkan gerakan anti swapraja di Surakarta.¹³⁹

Mangkunegara VIII melihat situasi politik di Surakarta tidak menguntungkan bagi kekuasaannya. Mangkunegara VIII mengeluarkan maklumat pada tanggal 20 Maret 1946. Dalam maklumat ini berisi tentang bahwa pemerintahan Mangkunegara akan mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap golongan orang-orang yang:

1. Menyiarkan berita atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengelisahkan atau mengacaukan masyarakat.
2. Menyiarkan berita atau melakukan perbuatan dengan maksud mengadakan perpecahan dalam masyarakat.
3. Menghambat usaha dalam menyempurnakan pertahanan negara.¹⁴⁰

Kebijakan politik Mangkunegara VIII sendiri merupakan usaha dari penguasa Mangkunegaran untuk menjalankan hegemoni kekuasaannya. Mangkunegara VIII

¹³⁸ Sri Juari Santoso. 2006. *Suara Nurani Keraton Surakarta*. Yogyakarta: KSD. Hal 85

¹³⁹ Soebagijo. 1981. *Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: Gunung Agung. Hal 171

¹⁴⁰ Arsip MN VIII No. 2422

menjalankan berbagai kebijakan politik untuk mempertahankan daerah istimewa sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 dan juga didukung dengan piagam presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1945. Tetapi usaha-usaha dari Mangkunegara VIII dalam mempertahankan Daerah Istimewa mendapat pertentangan dan ganjalan dari berbagai kelompok. Pihak Mangkunegaran sendiri kemudian mengantisipasi dengan cara yang ditunjukkan dalam menghadapi Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta. Komisaris Tinggi dan Direktorium setuju dengan sikap dan kebijakan politik Mangkunegaran VIII dalam menghadapi gerakan anti swapraja. Namun kelompok-kelompok anti swapraja tersebut juga melakukan tindakan intimidasi dan mengacaukan wilayah di Mangkunegaran. Namun dengan adanya pasukan militer di Mangkunegaran membuat kelompok anti swapraja tersebut mundur. Akan tetapi mereka menginginkan agar swapraja dihapus. Dan hal ini juga diperkuat dengan bergabungnya beberapa kelompok oposisi tersebut ke tubuh kelompok gerakan anti swapraja. Dan berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh Mangkunegara VIII ternyata berdampak pada eksistensi Mangkunegaran di Indonesia. dan dampak lainnya adalah dari kebijakan politik Mangkunegara VIII yaitu dihapuskannya wilayah-wilayah Mangkunegaran berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta.¹⁴¹

C. Respon Sosial dan ekonomi Mangkunegara VIII

Setelah kemerdekaan Indonesia, Mangkunegara VIII menyampaikan kondisi sosial dan ekonomi di istananya. Kondisi sosial dan ekonomi di istananya sendiri

¹⁴¹ Arsip MN VIII No. 2420

sedang kacau, dikarenakan istana Mangkunegara tersebut sudah tidak memiliki pemasukan untuk membayar pegawai Mangkunegaran dengan gaji yang besar. Hal ini membuat adanya pengurangan pegawai karena istana Mangkunegaran sendiri tidak mampu membebani gaji pegawai yang begitu besar. Pegawai Mangkunegaran yang tetap bertahan adalah pegawai yang benar-benar mengabdikan jiwa dan tenaganya terhadap istana Mangkunegaran. Para pegawai tersebut beranggapan jika kelak dapat melayani rajanya dengan baik maka akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Mangkunegara VIII sendiri berusaha keras supaya pegawai mangkunegaran yang tetap setia kepada istana tetap mendapatkan gaji. Mangkunegara VIII melakukan kebijakan yaitu berupa pendekatan kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya menteri dalam negeri untuk membantu pembiayaan rumah tangga istana Mangkunegaran.¹⁴²

Ketika wilayah istana Mangkunegaran sedang mengalami kekacauan pada masa revolusi dan mengalami kesulitan dalam hal sosial dan ekonomi, maka wilayah Mangkunegaran lainnya seperti Kabupaten Karanganyar dan Wonogori tidak mengalami kekacauan seperti halnya di istana Mangkunegaran. Ketika istana Mangkunegaran sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka wilayah inilah yang menjadi pemasok dan penunjang perekonomian wilayah Mangkunegaran. Dan kondisi sosial disekitar Mangkunegaran sendiri sangat kacau, hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat disekitar wilayah istana Mangkunegaran mengalami pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ini juga diperparah yakni naiknya harga

¹⁴² Dody Setiawan. 2013. *Biografi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VIII*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya. Hal 88

kebutuhan pokok di pasar. Hal tersebut juga membuat Mangkunegara VIII mengambil langkah kebijakannya. Langkah kebijakan yang diambil oleh Mangkunegara VIII yakni pengumpulan dan pembagian pakaian. Kebijakan ini diambil oleh Mangkunegara VIII karena banyak sekali masyarakat yang miskin yang membutuhkan pakaian. Yang kedua yakni penetapan harga kebutuhan pokok. Langkah kebijakan ini diambil oleh Mangkunegara VIII, karena Mangkunegara VIII sangat risau dengan harga kebutuhan pokok di pasar yang membuat masyarakat gelisah. Dengan mensterilkan dan menetapkan harga kebutuhan pokok ini, Mangkunegara VIII yakin masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok di pasar.¹⁴³

Proses Praja Mangkunegaran mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia sangat sulit dan susah. Hal ini terjadi dikarenakan Mangkunegara VIII tidak mau melepaskan hak istimewanya atau bisa disebut hak swapraja. Hal ini juga dikarenakan sifat dan karakter dari sang raja Mangkunegara VIII yang terkenal keras kepala. Dan Mangkunegara VIII sendiri juga mempunyai keinginan yaitu menjadi kepala daerah dan penguasa tunggal di Daerah Istimewa Surakarta. Ada alasan lagi Mangkunegara VIII tidak mau melepas hak istimewa adalah Mangkunegara VIII mempunyai wilayah kekuasaan yang luas dan di wilayah tersebut mempunyai sektor perekonomian yang menunjang yang mencukupi pemasukan keuangan di istana Mangkunegaran, hal ini juga dikarenakan di sektor tersebut mempunyai hasil panen yang cukup melimpah seperti di sektor pertanian,

¹⁴³ Dody Setiawan. 2013. *Biografi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VIII*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya. Hal 90

perkebunan, perhutanan dan juga di beberapa wilayah tersebut mempunyai pabrik-pabrik yang juga mempunyai peran sebagai roda perekonomian.¹⁴⁴

Mangkunegara VIII sendiri juga hidup di zaman yang dimana revolusi dan kekacauan ada dimana-mana. Mangkunegara VIII juga bingung dengan penunjukkan dia sebagai raja, padahal di usianya yang masih sangat muda, Mangkunegara VIII sendiri juga belum mempunyai pengalaman dalam hal kepemimpinan, tetapi sang ayah sendiri yaitu Mangkunegara VII yakin bahwa anaknya Mangkunegara VIII bisa melanjutkan kepemimpinan ayahnya Mangkunegara VII. Tetapi Mangkunegara VIII juga disibukkan dengan kondisi di dalam istananya yang sedang kacau.¹⁴⁵

Mangkunegara VIII sendiri juga dibuat pusing karena di dalam istananya sendiri terdapat banyak sekali para pegawai yang sudah tua dan harus diberikan dana pensiun untuk menunjang kehidupan para pegawai tersebut. Di dalam istananya sendiri tensi politik kian memanas, ketika para pegawai mangkunegaran menyuarakan pendapatnya mengenai sistem pemerintahan istana Mangkunegaran yang amburadul dan lagi-lagi hal ini disebabkan karena Mangkunegara VIII salah dalam mengambil keputusan. Hal tersebut terjadi karena Mangkunegara VIII mempertahankan sistem pemerintahan yang dianut oleh ayahnya Mangkunegara VII. Sistem ini diambil karena Mangkunegara VIII diamanahi oleh sang ayah untuk melanjutkan sistem pemerintahannya, tetapi disisi lain para pegawai yang bekerja di

¹⁴⁴ Mawardi dan Yuliani. 1995. *Dinamika Revolusi Sosial Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko. Hal 54.

¹⁴⁵ Dody Setiawan. 2013. *Biografi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VIII*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya. Hal 92.

mangkunegaran tidak setuju dengan konsep sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Mangkunegara VIII. Sistem pemerintahan yang diambil Mangkunegara VIII berupa sistem feodal dan konservatif.¹⁴⁶

Sistem inilah yang menjadi alasan Mangkunegara VIII dipertahankan. Sistem ini mungkin sangat kuno untuk dipilih dan dipertahankan oleh Mangkunegara VIII, tetapi Mangkunegara VIII tidak ada pilihan lain untuk mempertahankannya sistem ini. Bahkan sistem ini sudah tertata dan terancang sebagaimana sistem ini sudah digunakan oleh ayahnya yakni Mangkunegara VII. Namun sistem ini mendapat banyak pertentangan sekali pertentangan mulai dari para pegawai istana hingga masyarakat sekitar wilayah Mangkunegaran. Masyarakat dan para pegawai istana sendiri beranggapan bahwa Mangkunegara VIII salah dalam mengambil keputusan, hal ini dikarenakan masyarakat dan para pegawai istana sendiri beranggapan bahwa sistem yang digunakan Mangkunegara VIII sendiri adalah demi mempertahankan sistem swapraja yang sudah digunakan oleh para raja-raja pendahulu yang memimpin istana Mangkunegaran.¹⁴⁷

Dan bahkan masyarakat dan para pegawai Mangkunegaran menganggap sistem ini sudah terlalu kuno dan dianggap kolot, namun bagi Mangkunegara VIII sistem ini sangat menguntungkan, karena dengan sistem ini Mangkunegara VIII bisa mendapatkan tambahan pemasukan keuangan dari berbagai sektor di bidang perekonomian. Hal ini didukung juga wilayah kekuasaan Mangkunegaran yang

¹⁴⁶ Soemarsaid Moertono. 1985. *Negara dan Bina Usaha Negara di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor. Hal 85

¹⁴⁷ Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 50

subur dan ditambah lagi sebagian wilayah kekuasaan Mangkunegaran yaitu wilayah pegunungan. Namun pada tahun 1945 kericuhan ini terjadi yaitu terjadinya gesekan di dalam istana sendiri yang dilakukan oleh para pegawai istana yang tidak setuju dengan konsep sistem politik pemerintahan yang dijalankan oleh Mangkunegara VIII. Dan hal ini juga menambah tensi panas perpolitikan di istana Mangkunegaran. Dan ditambah lagi perekonomian di istana Mangkunegaran, hal ini membuat para pegawai mangkunegaran sendiri tidak mendapatkan gaji dan tunjangan dana pensiun untuk para pegawai yang sudah tua. Dan hal ini juga membuat Mangkunegara VIII sendiri pusing dengan kondisi yang dialami di istananya sendiri. Hal ini merupakan kesalahan sendiri yang dibuat oleh Mangkunegara VIII dalam mengambil keputusannya.¹⁴⁸

Konflik politik di dalam istana Mangkunegaran dimulai ketika para pegawai mulai menunjukkan sikap tak suka kepada sang raja Mangkunegara VIII. Para pegawai istana Mangkunegaran sendiri mulai berkumpul di halaman istana Mangkunegaran dan para pegawai sendiri juga membuat kericuhan dan hal inilah yang membuat Mangkunegara VIII mulai menunjukkan sikapnya. Hal ini disebabkan karena sebagai raja, Mangkunegara sendiri juga tak mau para pegawainya sendiri membuat kericuhan di dalam istana dan hal ini juga tidak diinginkan oleh Mangkunegara VIII karena kalau kericuhan tersebut masih

¹⁴⁸ Muhammad Anggie Farizqi Prasadana. 2019. Keruntuhan Birokrasi Tradisional Surakarta. *Jurnal Ilmu Sejarah* No. 2, Vol 2. Hal 196

berlanjut, maka hal yang terjadi adalah kerusakan di dalam istana Mangkunegaran.¹⁴⁹

Mangkunegara VIII sendiri mulai menenangkan suasana di dalam istananya dan Mangkunegara VIII mulai berbicara di depan para pegawainya. Mangkunegara VIII sendiri juga mulai angkat bicara dan menyampaikan beberapa hal yang mengenai kepemimpinannya yang tidak sesuai konsep pemerintahan istana Mangkunegara. Mangkunegara VIII juga menyampaikan hal ini kepada para pegawainya, mungkin sang raja sendiri juga terbebani ketika ia diangkat menjadi raja di istana Mangkunegara, namun Mangkunegara VIII sendiri juga ingat pesan yang disampaikan ayahnya yaitu Mangkunegara VII. Dan hal itu membuat suasana yang tadinya ricuh dan mencekam kini sudah terkendali, karena Mangkunegara sendiri angkat bicara dan menyampaikan berbagai hal tersebut kepada para pegawainya. Dan suasana di dalam istana Mangkunegara tersebut kembali kondusif setelah tadinya terjadi kericuhan.¹⁵⁰

D. Menyerahnya Mangkunegara VIII dan Pengakuan Kedaulatan NKRI

Setelah menyatakan menyerah dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli yang berisi pembekuan status swapraja kraton dan menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan bahwa Mangkunegara VIII benar-benar menyerah dan hal itu juga

¹⁴⁹ Ibid 196

¹⁵⁰ Adi Putra Surya Wardhana, dkk. 2019. Revivalisme Mangkunegara VIII di Era Republik. *Jurnal Ilmu Sejarah* No. 1, Vol. 34. Hal 108

diikuti oleh Susuhunan Paku Buwono XII.¹⁵¹ Dan hal ini dikarenakan pemerintah pusat betul-betul serius ingin membekukan dan menghapus status swapraja kraton. Dengan ini juga pemerintah pusat ingin menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Dan hal ini juga yang membuat pemerintah pusat murka, karena Mangkunegara VIII tidak mau melepas hak istimewa swapraja.¹⁵² Dan pemerintah pusat sendiri juga mengalami kesulitan karena Mangkunegara VIII memiliki sifat yang keras kepala. Dan dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli membuat Mangkunegara VIII pasrah dan menyerah. Dan menyerahnya Mangkunegara VIII juga diikuti oleh Susuhunan XII. Setelah Mangkunegara VIII menyatakan menyerah terhadap pemerintah pusat, Mangkunegara VIII juga mengeluarkan pengumuman yang berisi bahwa Mangkunegara VIII tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah pusat. Dan Mangkunegara VIII sendiri juga mengakui kedaulatan NKRI. Mangkunegara VIII juga bersumpah ikut bergabung dengan NKRI.¹⁵³ Pengumuman yang dikeluarkan oleh Mangkunegara VIII mendapat sambutan positif dari para pegawai istana Mangkunegaran dan rakyat sekitar istana Mangkunegaran. Dan dengan ini selesailah Revolusi sosial di Praja Mangkunegaran yang menelan banyak korban jiwa dan merupakan peristiwa terkelam bagi Praja Mangkunegaran sendiri. Dan itu juga

¹⁵¹ Dra. Sri Yuliani Widyaningsih, M.Pd. 2012. *Sejarah Lokal Surakarta*. Hal 91

¹⁵² F.X. Hadi Rudyatmo. 2013. *Daerah Istimewa Surakarta Dalam Pandangan Pemerintah Kota Surakarta*. Hal 10.

¹⁵³ Antony Reid. 1996. *Sejarah Nasional Indonesia*. hal 159

menandai tamatnya hak swapraja dan beberapa wilayah yang dahulunya merupakan kekuasaan dari Praja Mangkunegaran.¹⁵⁴

¹⁵⁴ F.X. Hadi Rudyatmo. 2013. *Daerah Istimewa Surakarta Dalam Pandangan Pemerintah Kota Surakarta*. Hal 9

BAB V

KESIMPULAN

Sistem swapraja sendiri merupakan sistem yang istimewa dikalangan kerajaan khususnya bagi seorang raja. Namun tanah swapraja tersebut juga terbagi dalam beberapa wilayah, hal ini juga tidak terlepas dari perjanjian dan campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Di Surakarta sendiri ada dua kerajaan yang mendapatkan hak swapraja yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Masing-masing kerajaan mendapatkan bagiannya, Kasunanan sendiri mendapatkan 4/5 wilayah tanah swapraja sedangkan Mangkunegaran mendapatkan sisanya. Wilayah Kasunanan sendiri meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Sedangkan wilayah Mangkunegaran meliputi Karanganyar, Wonogiri dan Baturetno. Dari segi hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu Swapraja dengan kontrak panjang dan Swapraja dengan kontrak pendek. Dalam sistem swapraja Mangkunegaran sendiri terdapat struktur birokrasi tradisonal yang terdiri beberapa kawedanan yang bertugas bertanggung jawab dalam pemerintahannya dan kawedanan tersebut terbagi menjadi 8 kawedanan yang terdiri dari Kawedanan Amongpraja, Reksapraja, Kartapraja, Martapraja, Kartipraja, Reksa Wibawa, Mandrapura dan Reksa Pura Baksana.

Sistem swapraja tersebut berjalan belum cukup baik di era sebelum kemerdekaan yaitu pada abad ke-20. Hal ini dikarenakan ada berbagai bidang yang belum sukses dijalankan sistem swapraja di Mangkunegaran. Dibidang ekonomi dan sosial sendiri, dibidang ini dibidang cukup vital bagi Mangkunegaran. Hal ini dikarenakan dibidang ini

merupakan penopang bagi Mangkunegaran. Dibidang ekonomi sendiri terbagi menjadi tiga yaitu ekonomi perkebunan, ekonomi pertanian, ekonomi kehutanan. Walaupun tiga bidang ekonomi tersebut juga tidak semuanya sukses, tetapi bidang ekonomi tersebut menyumbang keuangan bagi istana Mangkunegaran. Dibidang sosial dan pendidikan sendiri misalnya juga tidak semuanya berjalan mulus. Dibidang sosial sendiri juga terbilang belum bisa berbuat apa-apa dan memprihatinkan, hal ini juga dialami para penduduk sekitar Mangkunegaran yang hidup dalam kemiskinan dan mereka juga bekerja sehari-hari dengan upah yang minim. Dan bidang pendidikan sendiri juga bisa dibidang cukup sukses, hal ini dikarenakan dalam bidang ini pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan untuk penduduk bumiputra tanah air. Hal ini dikarenakan bahwa perhatian Belanda terhadap pendidikan di Mangkunegaran. Hal tersebut juga direspon oleh para keluarga istana Mangkunegaran. Para keluarga istana Mangkunegaran juga yakin dengan menyekolahkan para putranya kelak akan menjadi raja di istana Mangkunegaran dan hal ini juga menimbulkan semangat bagi penduduk Mangkunegaran untuk bersekolah. Dan Belanda sendiri juga memberikan beasiswa untuk sekolah ke eropa bagi para putra istana Mangkunegaran. Dan pada tahun 1923 Belanda sendiri juga membangun fasilitas sarana pendidikan yaitu dengan mendirikan sekolah kursus untuk rumah tangga.

Proses runtuhnya Swapraja Mangkunegaran sendiri terjadi pada tahun 15 Juli 1946. Hal ini disebabkan oleh pergantian tahta kepemimpinan di istana Mangkunegaran. Raja sebelumnya yaitu Mangkunegara VII meninggal dunia dan kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada Mangkunegara VIII. Dan disinilah kemunduran swapraja di

Mangkunegaran terjadi, hal terjadi dikarenakan usia dari raja Mangkunegaran VIII masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam kepemimpinan di istana Mangkunegaran. Hal ini juga mengingat lemahnya dukungan terhadap keraton. Dan hal tersebut juga berimbas pada bidang politik dan ekonomi-sosial. Pada saat berlangsungnya revolusi sosial 1945-1946 kondisi perekonomian di Mangkunegaran sendiri sangat kacau dan memprihatinkan dan juga membuat keuangan istana Mangkunegaran tersendat dan hal itu juga membuat pabrik-pabrik di wilayah Mangkunegaran berhenti. Sementara kondisi politik di istana Mangkunegaran sendiri juga kacau total, hal ini juga disebabkan dengan adanya gerakan anti swapraja yang dipimpin oleh Dr. Moewardi. Gerakan anti swapraja tersebut memberontak dan memiliki tujuan untuk menculik Mangkunegara VIII agar sang raja tersebut menyerah dan segera melepas hak swapraja. Namun rencana gerakan anti swapraja untuk menculik Mangkunegara VIII tidak berhasil, hal ini dikarenakan Mangkunegara VIII menyuruh pasukan militer istananya untuk berjaga di luar gerbang istana dan diminta juga pasukan berjaga di seluruh penjuru sudut istana Mangkunegaran.

Pemberontakan tersebut terjadi dua kali, dan situasi politik di luar istana Mangkunegaran mulai memanas kembali. Kali ini terjadi antara pasukan gabungan antara pasukan kaum oposisi yang ada di Surakarta dan pasukan gerakan barisan banteng pimpinan Dr. Moewardi. Mereka bersepakat untuk memberontak ke istana Mangkunegaran untuk menculik Mangkunegaran VIII dan menginginkan agar Mangkunegara VIII segera melepaskan hak swapraja. Dan situasi tersebut kembali memanas terjadi pada tanggal 28 Mei 1946, para demonstrasi pasukan kaum oposisi dan

gerakan barisan banteng terus bergerak ke istana Mangkunegaran. Pasukan tersebut sangatlah banyak dan hal ini disiasati oleh Mangkunegaran VIII dengan menyuruh pasukan militernya untuk berjaga di luar istana dan dipersenjatai persenjataan lebih lengkap dari yang pemberontakan pertama yang dilakukan gerakan barisan banteng. Para pasukan gabungan kaum oposisi dan barisan banteng terus menggempur istana Mangkunegaran, akan tetapi pasukan militer Mangkunegaran juga tak kalah kuatnya untuk memukul mundur pasukan gabungan tersebut. Namun kemenangan berada di pasukan militer Mangkunegaran dan pasukan gabungan yang terdiri kaum oposisi dan barisan banteng mundur dan kocar-kacir. Dan hal tersebut membuat kedudukan Mangkunegara VIII semakin kuat dengan mengeluarkan Maklumatnya dan serta membuat undang-undang baru yang isinya Mangkunegara VIII tetap berpegang teguh pada prinsipnya yaitu tetap mempertahankan hak swapraja beserta wilayah kekuasaannya.

Setelah Mangkunegara VIII ingin mempertahankan hak swapraja, namun hal tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah RI sendiri juga memperingatkan agar Mangkunegara VIII segera melepas hak swapraja dan mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Mangkunegara VIII dan Mangkunegara VIII sendiri semakin kuat dengan kedudukannya dengan mengeluarkan Maklumat Mangkunegara VIII dan membuat undang-undang baru. Hal tersebut juga mengundang kemarahan dari pemerintah RI, bahkan proses untuk mengakui kedaulatan RI juga menemui kesulitan karena Mangkunegara VIII bersifat keras kepala, tetap berprinsip pada pendiriannya dan

juga tidak mau melepaskan hak istimewanya. Namun pemerintah RI juga tidak kehilangan akal, bahkan pemerintah RI ingin membekukan daerah istimewa dan juga daerah wilayah kekuasaan Mangkunegaran, agar Mangkunegara VIII melepaskan hak istimewanya dan juga mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Peringatan tersebut membuat Mangkunegara VIII pasrah dan tunduk pada pemerintah Republik Indonesia. Dan hal itu juga membuat Mangkunegara VIII melepaskan hak istimewa atau swapraja. Dan pada tanggal 7 Juli 1946 Praja Mangkunegaran menyerah dan tunduk kepada pemerintah RI. Hal tersebut juga membuat satu persatu wilayah Mangkunegaran memisahkan dari Praja Mangkunegaran. Ada berbagai respon yang dilakukan Mangkunegaran VIII sendiri ketika setelah dihapusnya DIS yaitu respon politik dan respon sosial dan ekonomi. Respon politik sendiri yaitu pemerintahan Mangkunegara akan mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap golongan orang-orang yang: 1. Menyiarkan berita atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengelisahkan atau mengacaukan masyarakat. 2. Menyiarkan berita atau melakukan perbuatan dengan maksud mengadakan perpecahan dalam masyarakat. 3. Menghambat usaha dalam menyempurnakan pertahanan negara. Sedangkan respon ekonomi sendiri Mangkunegaran VIII mengambil beberapa langkah kebijakannya yakni pengumpulan dan pembagian pakaian. Kebijakan ini diambil oleh Mangkunegara VIII karena banyak sekali masyarakat yang miskin yang membutuhkan pakaian. Yang kedua yakni penetapan harga kebutuhan pokok. Langkah kebijakan ini diambil oleh Mangkunegara VIII, karena Mangkunegara VIII sangat risau dengan harga kebutuhan pokok di pasar yang membuat masyarakat gelisah. Dengan mensterilkan dan menetapkan harga

kebutuhan pokok ini, Mangkunegara VIII yakin masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip dan Dokumen

1. Arsip MN VIII No. 1950.
2. Arsip MN VIII No. 2420.
3. Arsip MN VIII No. 2422.
4. Arsip MN VIII No. 2436
5. Naskah M.N. No. 1900

B. Sumber Buku

1. A.H. Nasution. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid III*. Bandung: Angkasa.
2. A.K. Pringgodigdo. 1938. *Lahir Serta Tumbuhnya Kerajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko.
3. Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
4. Antony Reid. 1996. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
5. Ben Anderson. 2018. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
6. Darsiti Soeratman. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta tahun 1830-1839*. Yogyakarta: Taman Siswa.
7. Dr. Th. M. Metz. 1939. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Rekso Pustoko.

8. Dr. Soeyatno Kartodirdjo. 1982. *Revolusi Di Surakarta Tahun 1945-1946*. Surakarta: Rekso Pustoko.
9. Dra. Sri Yuliani Widyaningsih, M.Pd. 2012. *Sejarah Lokal Surakarta*. Salatiga: Widya Sari Press.
10. Drs. Wasino, M. Hum. 1996. *Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran 1900-1942*. Surakarta: Rekso Pustoko.
11. Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono dan Restu Gunawan. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
12. F.X. Hadi Rudyatmo. 2013. *Daerah Istimewa Surakarta Dalam Pandangan Pemerintah Kota Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko.
13. G. Moedjanto. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
14. G.P. Rouffear. 1983. *Swapraja diterjemahkan oleh M. H. Pringgokusumo*. Surakarta: Rekso Pustoko.
15. George. D. Larson. 1990. *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Di Surakarta*. Yogyakarta: UGM Press.
16. George Mc. Turnan Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
17. H. Karkono Kamajaya. 1993. *Revolusi Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko.
18. H.R.Soetomo. 2000. *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan Di Daerah Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko.
19. Ibrahim Julianto. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.

20. Imam Samroni. 2010. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ditinjau dari Perspektif, Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis*. Yogyakarta: Pura Pustaka.
21. Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
22. Leslie H. Palmier. 1960. *Social Status and Power in Java*. University of London.
23. M. Solly Lubis. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
24. Mawardi dan Yuliani. 1995. *Dinamika Revolusi Sosial Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko.
25. M. C. Riclefs. 1981. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
26. Moh. Dalyana. 1939. *Ketataprajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko.
27. Mr. Soewidji. 1973. *Kisah Nyata di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta*. Semarang: Percetakan Universitas Satya Wacana.
28. Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
29. Prof Dr. Suhartono. 2001. *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Laper Pustaka.
30. R. T. M. Husodo Pringgokusumo. 1989. *Memori Van Overgave*. Surakarta: Rekso Pustoko.
31. S. Margana. 2004. *Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
32. Sartono Kartodirdjo. 1983. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
33. Soebagijo. 1981. *Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: Gunung Agung.

34. Soemarsaid Moertono, 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa*. Jakarta: Obor.
35. Sri Juari Santoso. 2006. *Suara Nurani Keraton Surakarta*. Yogyakarta: KSD.
36. Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
37. Supomo. 1957. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
38. Takahashi Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
39. Taufik Abdullah, dkk. 1983. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
40. Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putera: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LkiS.
41. Wasino. 2014. *Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

C. Sumber Jurnal

1. Adi Putra Surya Wardhana, dkk. 2019. Revivalisme Mangkunegara VIII di Era Republik. *Jurnal Ilmu Sejarah* No. 1, Vol. 34.
2. Alfian. 1977. *Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian*. Prisma No. 8, Agustus 1977.
3. Aman, M.Pd. 2001. *Jurnal Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: UNY.
4. Muhammad Anggie Farizqi Prasadana. 2019. Keruntuhan Birokrasi Tradisional Surakarta. *Jurnal Ilmu Sejarah* No. 2, Vol 2.
5. Ni'matul Huda. 2013. Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa. *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 20.

D. Sumber Skripsi dan Laporan

1. Andi Nurma Utamawan. 2010. *Pemerintah Darurat Militer Surakarta Dan Dampaknya Terhadap Pemerintahan Kota Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Anjar Rahmad Basuki. 2010. *Peranan Komisi Dana Milik Mangkunegaran Dalam Proses Nasionalisasi Aset-Aset Mangkunegaran*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ary Emawati Bayu Prastiwi. 2011. *Kebijakan Ekonomi Mangkunegaran*. Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jurusan IPS Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Belda Ranika Rosiana. 2013. *Terbentuknya Birokrasi Modern Di Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Devy Ariyanti, 2013. *Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja Di Surakarta Tahun 1945-1946*. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.
6. Dody Setiawan. 2013. *Biografi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VIII*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya.
7. Hari Nur Prasinta. 2009. *Pengaruh Kondisi Sosial-Politik Terhadap Kabupaten Martanimpoena*. Skripsi: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih. 1993. *Laporan Penelitian Perkebunan Tebu dan Petani di Mangkunegaran Pada Masa Belanda*. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Veteran Sukoharjo.

E. Sumber Koran

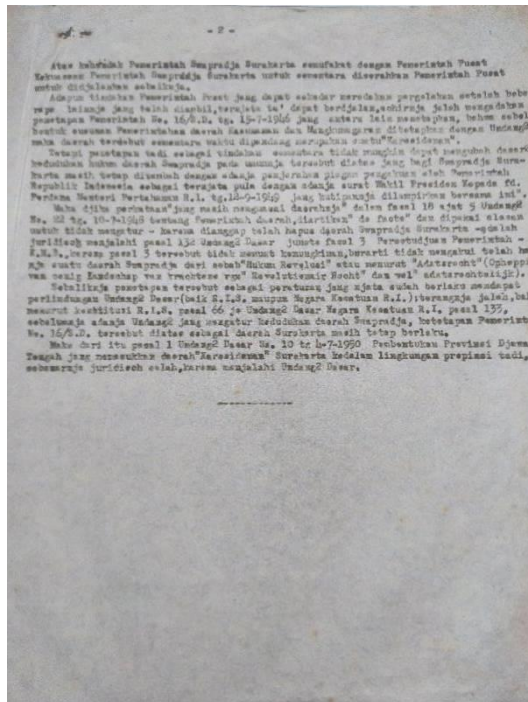
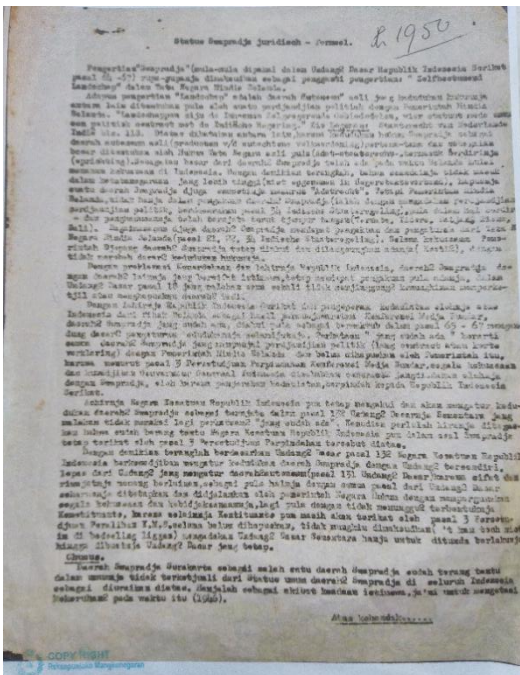
1. "Dewan Pemerintahan Rakyat Dan Tentara Daerah Surakarta". *Antara*, 3 Juni 1946
2. "Tindakan Pemerintah Pusat Terhadap Daerah Istimewa Surakarta". *Jogja*, 23 Mei 1946
3. "Maklumat Menteri Dalam Negeri". *Kedaulatan Rakyat*, 6 Mei 1946
4. "Mosi KNI Kabupaten Kota Mangkunegaran". *Kedaulatan Rakyat*, 10 Mei 1946
5. "Mosi pemilihan umum Daerah Surakarta". *Kedaulatan Rakyat*, 13 Mei 1946
6. "Maklumat Barisan Banteng". *Kedaulatan Rakyat* 15 Mei 1946

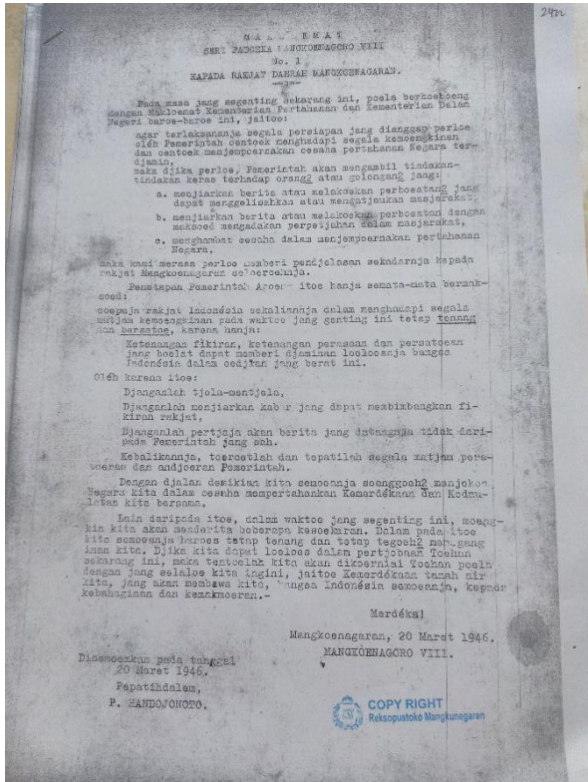
F. Sumber Internet

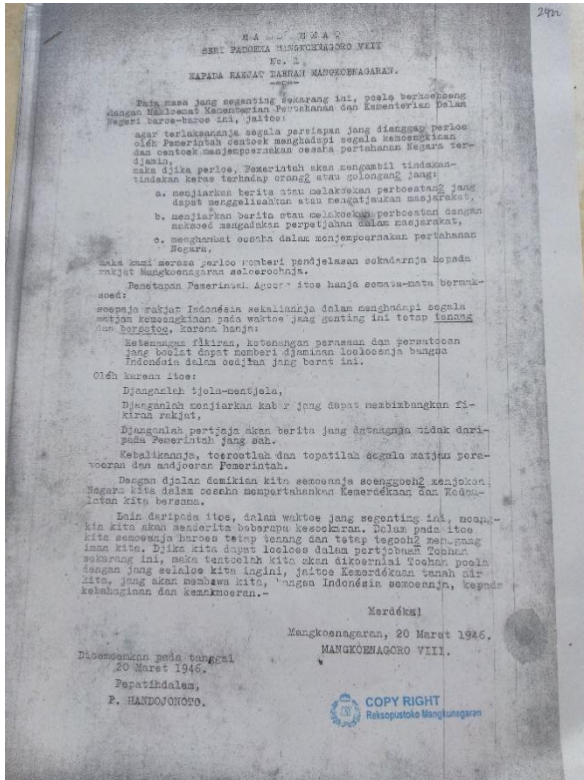
1. <https://banyumasdaily.com/2022/02/15/menakar-kembali-daerah-istimewa-surakarta/>

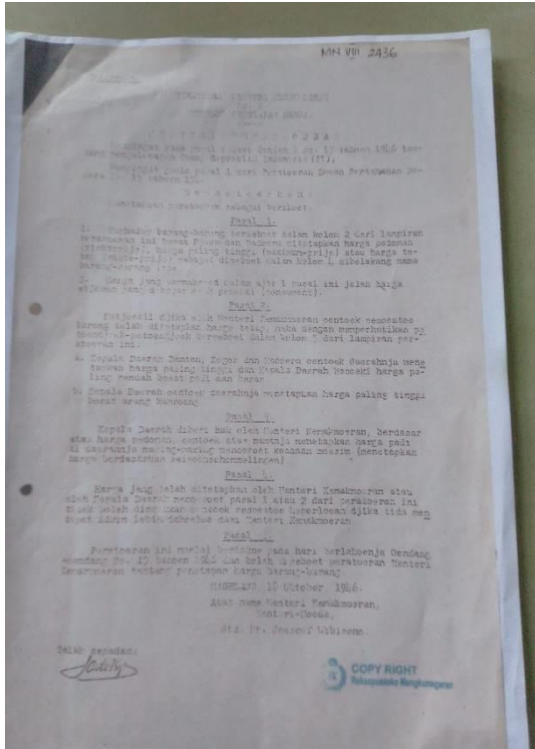
Lampiran-Lampiran Arsip

Arsip MN VIII No. 1950









Naskah MN VIII No 1900

BAB IV
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PRTANI

A. Tingkat Pendapatan

Selama akhir abad XIX maupun awal abad XX, kondisi sosial-ekonomi penduduk di tanah jajahan, khususnya di Indonesia, relatif rendah. Sejak masa liberal (1870 - 1900) para penganut politik liberal ini memercanakan, bahwa dengan diberlakukannya sistem ekonomi liberal akan dapat membawa kemakmuran penduduk tanah jajahan. Para penganut politik ini mengemukakan hal-hal tersebut sebagai dasar yang dianggap telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk. Tetapi, selanjutnya bagaimana yang terjadi, setelah ekonomi liberal dilaksanakan. Ternyata, pengharapan yang optimistis ini menjadi, ketika yang demikian itu membawa kemunduran kesejahteraan penduduk pribumi (Sartono Kartodirdjo, 1967: XVII). Demikian halnya selama politik etis sejak 1900, kondisi tersebut juga tidak beranjak ke arah yang lebih baik, kecuali yang dirasakan orang-orang Belanda dan sebagian kecil penduduk pribumi, yaitu kalangan birokrat.

Kehidupan petani pedesaan selama masa tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan kebanyakan penduduk pribumi. Pendapatan rumah tangga mereka makin lama justru merosot secara riil atau kualitatif. Bahkan secara kuantitatif. Suatu contoh, hasil sewa tanah yang mereka peroleh selama Tanah Paksa (1830-1870) dapat mencapai f 42,- per bau, tetapi pada 1900 telah turun menjadi f 25,- per bau (Sartono Kartodirdjo et al., 1975: 101). Rata-rata pendapatan per rumah tangga pe-

39

40

da tahun 1900 hanya sekitar f 80,- setiap tahun. Pendapatan yang relatif rendah ini masih dikurangi pajak f 16,- sehingga tinggal sisa f 64,-. Dapat dibayangkan bahwa besar pendapatan sekian untuk menanggung beban hidup sekeluarga selama satu tahun.

Dalam konteks lokal di swasraya Mangkunegaran, kehidupan sosial-ekonomi penduduk kebanyakan, terutama golongan mayoritas petani, tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Yoratanlandan. Berdasarkan penelitian Suhartono (1991:45-47), di Yoratanlandan pada tahun 1888 pendapatan petani rendah sekali dengan beban pajak yang cukup besar. Suatu contoh, pada saat itu sewa tanah untuk perkebunan tebu selama 18 bulan hanya f 90,-. Karena sewa tanah setahun f 60, pajak tanah f 12 - f 18, maka tinggal sisa sekitar f 40,- per bau. Di Surakarta pada tahun 1888 pendapatan petani kelas I f 64, petani kelas II f 48, petani kelas III f 24, dan masing-masing terkena beban pajak tanah sebesar f 12 (8,75%), f 10 (20,80%), f 8 (33,50%). Pada tahun 1914-1915, pajak tanah di Mangkunegaran f 5 (sawah) dan f 1,33 (tegalan), tetapi kemudian diturunkan sedikit yang tak berarti.

Pengeluaran sehari-hari setiap rumah 3 cangkir beras, 1,5 sen, trasi 2 sen, gula aren 2,5 sen, gambir 1,5 sen, oncom 1,5 sen, tembakau 5 sen, cabai 1 sen, pakaian 20 sen, seluruhnya 34 sen. Padahal upah per hari yang dapat diperoleh petani 30-40 sen. Ini berarti antara pendapatan per hari hanya habis untuk hari itu juga, padahal mereka belum pasti akan memperoleh hasil sebesar itu.

40

da tahun 1900 hanya sekitar f 80,- setiap tahun. Pendapatan yang relatif rendah ini masih dikurangi pajak f 16,- sehingga tinggal sisa f 64,-. Dapat dibayangkan bahwa besar pendapatan sekian untuk menanggung beban hidup sekeluarga selama satu tahun.

Dalam konteks lokal di swasraya Mangkunegaran, kehidupan sosial-ekonomi penduduk kebanyakan, terutama golongan mayoritas petani, tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Yoratanlandan. Berdasarkan penelitian Suhartono (1991:45-47), di Yoratanlandan pada tahun 1888 pendapatan petani rendah sekali dengan beban pajak yang cukup besar. Suatu contoh, pada saat itu sewa tanah untuk perkebunan tebu selama 18 bulan hanya f 90,-. Karena sewa tanah setahun f 60, pajak tanah f 12 - f 18, maka tinggal sisa sekitar f 40,- per bau. Di Surakarta pada tahun 1888 pendapatan petani kelas I f 64, petani kelas II f 48, petani kelas III f 24, dan masing-masing terkena beban pajak tanah sebesar f 12 (8,75%), f 10 (20,80%), f 8 (33,50%). Pada tahun 1914-1915, pajak tanah di Mangkunegaran f 5 (sawah) dan f 1,33 (tegalan), tetapi kemudian diturunkan sedikit yang tak berarti.

Pengeluaran sehari-hari setiap rumah 3 cangkir beras, 1,5 sen, trasi 2 sen, gula aren 2,5 sen, gambir 1,5 sen, oncom 1,5 sen, tembakau 5 sen, cabai 1 sen, pakaian 20 sen, seluruhnya 34 sen. Padahal upah per hari yang dapat diperoleh petani 30-40 sen. Ini berarti antara pendapatan per hari hanya habis untuk hari itu juga, padahal mereka belum pasti akan memperoleh hasil sebesar itu.

Lampiran-Lampiran Koran

"Dewan Pemerintahan Rakyat Dan Tentara Daerah Surakarta". *Antara*, 3 Juni 1946

POETRI DAN DIMAS

DEWAN PEMERINTAH RAKJAT DAN TENTERA DAERAH SOERAKARTA BERDIRI.

PODJO
Mooka
gria

SOLO, 3-6. Wawasan kita mengabarkan: Berhubung dengan peristiwa dalam daerah Soerakarta belakangan ini, maka Kepala Tentara Republik Indonesia Soerakarta, pada tanggal 6 bulan 6 tahun 1946 memuat sebagai berikut maklumat sebagai berikut: -

Maklumat No. 1

Setelah mengetahui dan mendengarkan pemerintahan yang terdapat di daerah Soerakarta pada akhir ini:

Melambung: Bahwa terdapat dengan pemerintahan diatas, perlu diadakan perubahan dan tindakan untuk menghidupkan kembali keadaan yang menghidupkan kembali keadaan.

Kepentingan pemerintahan daerah adalah:

Membentuk: -

1. membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat dan Tentara Daerah Soerakarta yang terdiri dari tentara, Wakil Rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Untuk melindungi pemerintahan sehari-hari Tentara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Untuk melindungi pemerintahan sehari-hari Tentara dan Pemerintah Republik Indonesia.
4. Untuk melindungi pemerintahan sehari-hari Tentara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan dengan pasal: 1. Kewenangan 2. Kewenangan 3. Kewenangan 4. Kewenangan

Maklumat No. 2

Untuk melindungi keamanan dan ketertarikan di daerah Soerakarta, maka dibentuklah Dewan Pemerintahan Rakyat dan Tentara Daerah Soerakarta yang terdiri dari tentara, Wakil Rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Untuk melindungi pemerintahan sehari-hari Tentara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk melindungi pemerintahan sehari-hari Tentara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk melindungi pemerintahan sehari-hari Tentara dan Pemerintah Republik Indonesia.

K KADAHAN

"Tindakan Pemeintah Pusat Terhadap Daerah Istimewa Surakarta". *Jogja, 23 Mei 1946*



"Maklumat Menteri Dalam Negeri". *Kedaulatan Rakyat, 6 Mei 1946*

